SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 273 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN ARJASARI
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 107);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 121).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN ARJASARI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah atau yang disebut dengan Bapperida adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Bandung untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Bandung untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan Kecamatan Arjasari untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan Kecamatan Arjasari untuk periode 1 (satu) tahunan.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu Perangkat Daerah, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.

BAB II
RUANG LINGKUP
RENSTRA KECAMATAN ARJASARI

Pasal 2

Dokumen Renstra Kecamatan Arjasari merupakan dokumen perencanaan strategis Kecamatan Arjasari untuk periode 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Arjasari yang memuat tujuan, sasaran, indikator, target kinerja, strategi dan kebijakan dalam Renstra Kecamatan Arjasari yang berpedoman pada RPJMD tahun 2025-2029.

Pasal 3

Dokumen Renstra Kecamatan Arjasari bertujuan untuk:

a. menjaga kesinambungan serta konsistensi pelaksanaan pembangunan dengan visi misi RPJMD dan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Arjasari dalam kerangka waktu sesuai kapasitas Kecamatan Arjasari dalam implementasinya;
b. menerjemahkan arah dan kebijakan Pemerintah Daerah terkait perkembangan pelayanan Kecamatan Arjasari agar lebih dipahami dan bermanfaat bagi masyarakat;
c. memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu strategis yang menjadi prioritas pelayanan Kecamatan Arjasari;
d. menyediakan dasar *(benchmark)* untuk mengukur sejauh mana kemajuan untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Arjasari;
e. merumuskan fokus, strategi dan langkah-langkah yang jelas untuk mencapai tujuan; dan
f. membantu dalam melakukan evaluasi kinerja Kecamatan Arjasari.

BAB III
SISTEMATIKA RENSTRA KECAMATAN ARJASARI

Pasal 4

(1) Renstra Kecamatan Arjasari Tahun 2025-2029 menjadi pedoman Kecamatan Arjasari dalam menyusun Renja Kecamatan Arjasari.
(2) Renstra Kecamatan Arjasari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. bab I pendahuluan paling sedikit memuat:
   1. latar Belakang;
   2. dasar hukum penyusunan;
   3. maksud dan tujuan; dan
   4. sistematika penulisan.
b. bab II gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis Kecamatan Arjasari paling sedikit memuat:
   1. gambaran pelayanan Kecamatan Arjasari; dan
   2. permasalahan dan isu strategis Kecamatan Arjasari.
c. bab III tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan paling sedikit memuat:
   1. tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Arjasari Tahun 2025-2029;
   2. strategi Kecamatan Arjasari dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029; dan
   3. arah kebijakan Kecamatan Arjasari dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029.
d. bab IV program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan paling sedikit memuat:
   1. uraian program, kegiatan, subkegiatan, beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
   2. uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
   3. target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama Kecamatan Arjasari; dan
   4. target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci.
e. Bab V penutup paling sedikit memuat:
   1. kesimpulan;
   2. kaidah pelaksanaan; dan
   3. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

(3) Dokumen Renstra Kecamatan Arjasari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENSTRA
KECAMATAN ARJASARI

Pasal 5

(1) Kecamatan Arjasari melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Kecamatan Arjasari dan evaluasi hasil Renstra Kecamatan Arjasari sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bapperida.
(2) Bapperida melakukan verifikasi atas hasil pengendalian dan evaluasi yang dilakukan Kecamatan Arjasari terhadap pelaksanaan dan hasil Renstra Kecamatan Arjasari.
(3) Camat Arjasari menindaklanjuti hasil verifikasi sebagaimana pada ayat (2) sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan Renstra Kecamatan Arjasari.
(4) Format pengendalian dan evaluasi serta verifikasi sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN ARJASARI

Pasal 6

Perubahan Renstra Kecamatan Arjasari dapat dilakukan apabila :

a. perubahan Renstra Kecamatan Arjasari mempedomani perubahan RPJMD;
b. perubahan Renstra Kecamatan Arjasari dilakukan sekurang kurangnya adanya perubahan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan; dan
c. apabila terdapat perubahan kelembagaan Kecamatan Arjasari, maka Renstra Kecamatan Arjasari dapat dilakukan perubahan dengan tetap mempedomani program, indikator program dan pendanaan indikatif dalam RPJMD.

Pasal 7

Perubahan Renstra Kecamatan Arjasari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

(1) Indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang tercantum dalam Dokumen Renstra Kecamatan Arjasari Tahun 2025-2029 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
(2) Dalam hal pelaksanaan Renstra Kecamatan Arjasari terjadi perubahan target capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah indikator sasaran pembangunan jangka menengah, perubahan dapat dilakukan dalam Renja Kecamatan Arjasari.
(3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengakomodir perubahan indikator kinerja dan indikasi pendanaan, baik sebagian maupun keseluruhan pada bagian tersebut.
(4) Kerangka Pendanaan yang mencakup pendapatan, belanja dan pembiayaan yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini merupakan angka yang bersifat indikatif, yang akan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat, kebijakan pemerintah provinsi dan kemampuan keuangan daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 17 September 2025

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 17 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 273

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

DESY ARYANTI, S.H.,M.H.
Penata Tingkat I
NIP. 197709232010012001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR 273 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN ARJASARI
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN ARJASARI
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR.....TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN ARJASARI TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN ARJASARI
KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Renstra Kecamatan Arjasari Tahun 2025-2029, merupakan tindak lanjut adanya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Instruksi Menteri Dalam negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta Peraturan Bupati Bandung Nomor 63 Tahun 2024, tentang Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

Renstra Kecamatan Arjasari Tahun 2025-2029 disusun sebagai komitmen perencanaan jangka menengah Kecamatan Arjasari serta sebagai alat bantu dalam menjalankan kebijakan strategis Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029. Kesemuanya itu menjadi landasan dan acuan pelaksanaan kegiatan di seluruh sub unit kerja pada lingkungan Kecamatan Arjasari selama kurun waktu Tahun 2025-2029 dan merupakan tolok ukur dalam melaksanakan tugas/kegiatan selama kurun waktu lima tahun kedepan

Kecamatan Arjasari sebagai salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Bandung merespon terdepan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya mempunyai tugas pokok yaitu

melaksanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di tingkat kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut maka ditetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang semuanya mengacu pada visi dan misi Kabupaten Bandung. Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran, dituntut bekerja dan berusaha agar bisa melaksanakannya. Dari berbagai usaha untuk mencapainya, tentu saja ada yang berhasil dengan baik, setengah berhasil bahkan ada yang tidak berhasil. Di sini terlihat bahwa selain kemampuan SDM juga banyak dipengaruhi oleh situasi, kondisi dan lingkungannya.

Karena kemampuan SDM itu sangat terbatas, bila dibandingkan dengan visinya, maka kita dihadapkan kepada pilihan-pilihan atau alternatif yang ada. Di dalam memilih alternatif inilah kemudian timbul suatu perencanaan strategis agar visi, misi, tujuan dan sasaran dapat dilaksanakan tahap demi tahap.

Renstra Kecamatan Arjasari merupakan landasan dan pedoman bagi langkah-langkah kegiatan yang akan dilaksanakan pada periode tahun 2025-2029.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang menjadi dasar dalam penyusunan Renstra Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);

4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 100);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 107);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 121);
19. Peraturan Bupati Bandung Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 120 tahun 2023 Tentang Tugas, Fungsi

dan Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 39);

20. Keputusan Bupati Bandung Nomor 137/Kep. 769-TAPEM/2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Arjasari Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Renstra Kecamatan Arjasari Tahun 2025-2029 adalah dalam rangka mengoptimalkan pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan sasaran sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Arjasari yang berdasarkan pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Arjasari Tahun 2025-2029 untuk memberikan arah dan pedoman bagi aparatur Kecamatan Arjasari dalam melaksanakan rencana kegiatan jangka menengah untuk menunjang pencapaian Visi, Misi, tujuan dan sasaran sesuai tugas pokok dan fungsi yang berdasarkan pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Bandung 2025-2029.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penyusunan Renstra Kecamatan Arjasari Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menguraikan secara singkat Latar belakang pembuatan Renstra Kecamatan Arjasari, Proses penyusunan Renstra Kecamatan Arjasari, keterkaitan Renstra Kecamatan Arjasari dengan RPJMD Kabupaten Bandung.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Menguraikan penjelasan tentang, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Menguraikan penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN ARJASARI

2.1. Gambaran Pelayanan Kecamatan Arjasari

2.1.1. Tugas, Fungsi dan struktur Organisasi Kecamatan Arjasari

Memuat penjelasan tentang gambaran kedudukan Kecamatan, struktur organisasi Kecamatan, tugas pokok dan fungsi aparatur Kecamatan sesuai dengan yang telah ditetapkan dan melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat.

2.1.2. Sumber Daya Kecamatan Arjasari

Memuat penjelasan ringkas tentang Sumber daya yang ada di Kecamatan Arjasari, dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

2.1.3. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Arjasari

Menjelaskan secara ringkas tingkat capaian kinerja Kecamatan Arjasari berdasarkan target Renstra Kecamatan Arjasari periode sebelumnya.

2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Kecamatan Arjasari

Memuat secara umum tentang kelompok Sasaran layanan.

2.1.5. Mitra Kecamatan Arjasari dalam Pemberian Layanan

Memuat secara umum yang menjadi Mitra dalam pemberian layanan di Kecamatan Arjasari

2.2. Permasalahan dan isu Strategis Kecamatan Arjasari

2.2.1. Penelaahan RPJMN 2025-2029

2.2.2. Penelaahan RPJMD Kabupaten Bandung 2025-2029

2.2.3. Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung

2.2.4. Analisis Terhadap Dokumen hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

2.2.5. Permasalahan Pelayanan Kecamatan Arjasari

Memuat permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan Kecamatan Arjasari

2.2.6. Isu Strategis

Memuat telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra Kecamatan Arjasari Telaahan Rencana tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup, Penentuan isu-isu strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029

Memuat Tujuan Renstra Perangkat Daerah periode dalam lima tahun mendatang

3.2. Strategi Kecamatan Arjasari dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Arjasari Tahun 2025-2029

Memuat strategi Renstra kecamatan Arjasari dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Arjasari dalam lima tahun mendatang

3.3. Arah Kebijakan Kecamatan Arjasari dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Arjasari Tahun 2025-2029

Memuat Arah Kebijakan Kecamatan Arjasari dalam mencapai tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Uraian Program, Kegiatan, Sub kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

Memuat Program, Kegiatan, Sub Kegiatan beserta kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif yang akan digunakan pada Renstra dalam lima tahun mendatang

4.2. Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Memuat SubKegitan yang mendukung program prioritas pembangunan Daerah yang ada pada Renstra dalam lima tahun mendatang

4.3. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Arjasari Tahun 2025-2029 malaui IKU Kecamatan Arjasari

Memuat Target pencapaian Tujuan dan Sasaran dalam renstra dalam lima tahun yang akan datang

4.4. Target Kinerja Penyelenggaraan Ursuan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui IKK

Memuat tentang Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah melalui IKK selama lima tahun mendatang

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

5.2. Kaidah pelaksanaan

5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN ARJASARI

2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Arjasari

Kecamatan Arjasari sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Bandung memiliki peran penting dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewilayahan. Sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Kabupaten Bandung, kecamatan menjadi garda terdepan dalam pelayanan publik yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap gambaran pelayanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Arjasari menjadi bagian penting dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025–2029. Gambaran ini tidak hanya berfungsi sebagai potret kinerja pelayanan saat ini, tetapi juga menjadi dasar penting dalam menyusun strategi peningkatan kualitas pelayanan publik yang adaptif, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, pelayanan publik di Kecamatan Arjasari diharapkan dapat memenuhi harapan masyarakat serta selaras dengan arah pembangunan Kabupaten Bandung.

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Kecamatan Arjasari

Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 90 Tahun 2025 tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, Dalam Rangka Penataan Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor : 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan susunan Organisasi Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, Kecamatan terdiri dari :

a. Camat

b. Sekretariat Kecamatan, membawahkan :

   1. Subbagian Program dan Keuangan; dan

   2. Subbagian Umum dan Kepegawaian

c. Seksi Pemerintahan;

d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;

e. Seksi Pembangunan;

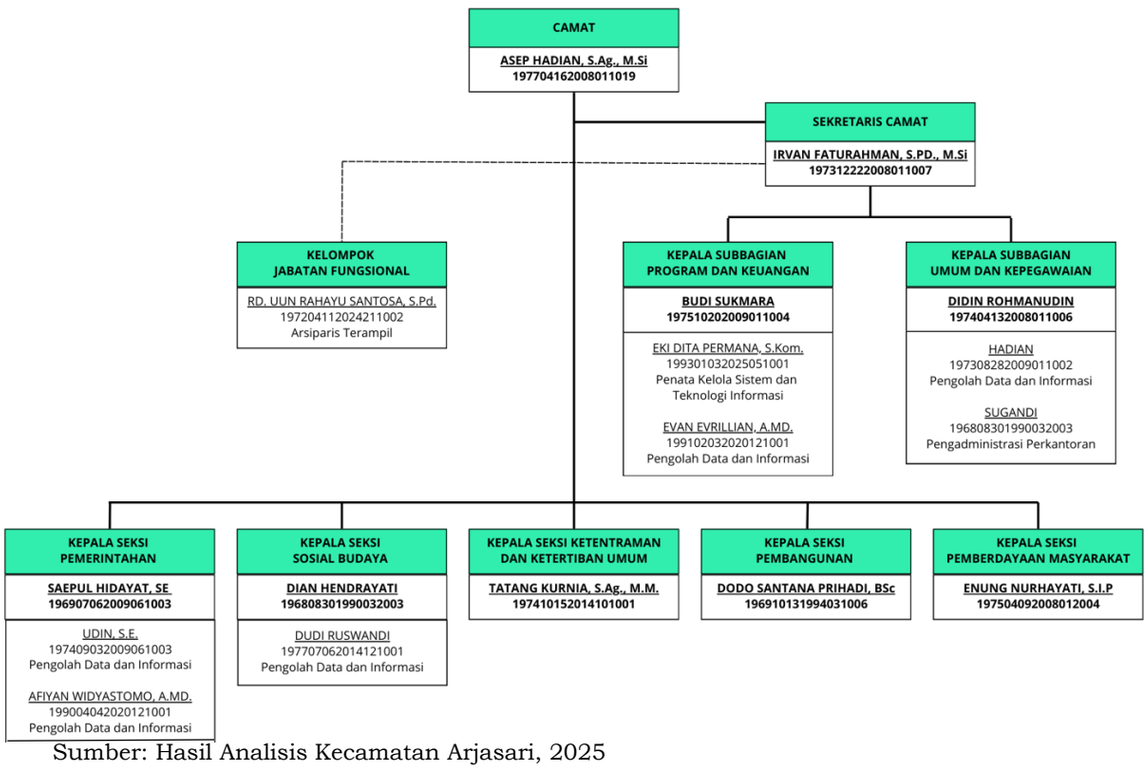
f. Seksi Sosial Budaya;

g. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan

h. Jabatan Fungsional.

Adapun Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Arjasari sebagai berikut:

Gambar 2.1 Susunan Organisasi Kecamatan Arjasari



Sumber: Hasil Analisis Kecamatan Arjasari, 2025

1. Camat mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan tugas umum pemerintahan serta urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan.

   Dalam menyelenggarakan tugas pokok Camat mempunyai fungsi:

   a. perumusan, pengaturan, pengkoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan umum dan teknis operasional bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum, pembangunan dan sosial budaya;
   b. penyelenggaraan pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas bidang

pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum, pembangunan dan sosial budaya;

c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
d. penyelenggaraan *monitoring*, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Kecamatan

2. Sekretaris mempunyai tugas pokok merumuskan rencana kerja kesekretariatan yang meliputi pelayanan perencanaan, umum dan kepegawaian, keuangan serta, evaluasi dan pelaporan.

   Dalam menyelenggarakan tugas pokok Sekretaris mempunyai fungsi:

   a. penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
   b. pengumpulan, pengolahan usulan program dan kegiatan;
   c. penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;
   d. penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan umum dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
   e. penyelenggaraan dan pengkoordinasian Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
   f. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
   g. penyelenggaraan *monitoring*, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sekretariat.

3. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan rencana dan program serta pengelolaan adminsitrasi keuangan.

   Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

   a. Penyusunan rencana dan program kerja Kecamatan, sesuai dengan hasil musrenbang, visi dan misi, rencana strategis Kecamatan dan Daerah;
   b. Pelaksanaan koordinasi dengan Subbagian dan Seksi, untuk penyusunan dan penetapan rencana kerja Kecamatan;
   c. Pelaksanaan koordinasi dengan Subbagian Umum dan Kepegawaian untuk penyusunan tugas dan fungsi Kecamatan;

d. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kecamatan;
e. Pelaksanaan koordinasi dengan Subbagian dan Seksi, untuk pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kecamatan;
f. Pelaksanaan penyusunan laporan pengelolaan keuangan Kecamatan;
g. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi Penyusunan Program dan Keuangan Kecamatan;
h. Pelaksanaan *monitoring*, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan.

4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok Menyusun dan melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan dan keprotokolan, barang milik daerah/aset dan rumah tangga, penyiapan kebutuhan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai serta administrasi kepegawaian lainnya.

   Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
   a. penyusunan bahan pelaksanaan pelayanan umum dan kepegawaian, kelembagaan serta ketatalaksanaan;
   b. pelaksanaan koordinasi dengan Subbagian dan Seksi, untuk penyusunan dan penetapan tugas dan fungsi Kecamatan;
   c. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, barang milik daerah/aset, rumah tangga kedinasan dan administrasi kepegawaian;
   d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
   e. pelaksanaan *monitoring*, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
   f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
   g. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya

5. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pemerintahan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pemerintahan;
b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pemerintahan;
c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. pelaksanaan *monitoring*, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pemerintahan.

6. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

   Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

   a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
   b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
   c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
   d. pelaksanaan *monitoring*, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

7. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

   Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi :

   a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
   b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
   c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
   d. pelaksanaan *monitoring*, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

8. Kepala Seksi Pembangunan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pembangunan.

   Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

   a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pembangunan;
   b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pembangunan;
   c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
   d. pelaksanaan *monitoring*, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pembangunan.

9. Kepala Seksi Sosial Budaya mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Sosial Budaya.

   Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi:

   a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Sosial Budaya;
   b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Sosial Budaya;
   c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
   d. pelaksanaan *monitoring*, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Sosial Budaya.

2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Arjasari

Kecamatan Arjasari memiliki sumber daya yang terdiri dari penyediaan sumber daya manusia berdasarkan jenis kelamin, pangkat/ golongan, tingkat pendidikan, jenis pendidikan yang di ikuti baik pendidikan formal dan non formal serta penyediaan sarana dan prasarana yang dapat menunjang penyelenggaraan kegiatan pelayanan yang diberikan untuk masyarakat di Wilayah Kecamatan Arjasari. Berikut ini sumber daya yang dimaksud berdasarkan inventarisasi per bulan Agustus 2025:

2.1.2.1. Sumber Daya Aparatur

Jumlah Aparatur Sipil Negara pada Kecamatan Arjasari berjumlah 17 orang, terdiri dari 9 (sembilan) orang pejabat struktural, 6 (enam) orang staf

pelaksana, dan 2 (satu) orang tenaga PPPK. Selain itu terdapat pula 6 orang tenaga non ASN.

Kondisi pegawai di Kecamatan Arjasari berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1

Kondisi Kepegawaian berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2025

JENIS KELAMIN	ASN	NON ASN	JUMLAH
Laki-Laki	15	6	21
Perempuan	2	0	2

Sumber: Hasil Analisis Kecamatan Arjasari, 2025

Tabel 2.2
Kondisi Kepegawaian berdasarkan Pangkat dan Golongan
Tahun 2025

Golongan	Status Kepegawaian		Jenis Kelamin		Jumlah	Persentase
	PNS	PPPK	Laki-Laki	Perempuan		
Golongan I	0	0	0	0	0	0%
Golongan II	4	0	4	0	4	24%
Golongan III	10	0	8	2	10	58%
Golongan IV	1	0	1	0	1	6%
Golongan V (PPPK)	0	1	1	0	1	6%
Golongan VII (PPPK)	0	1	1	0	1	6%
Jumlah	15	2	15	2	17	100%

Sumber: Hasil Analisis Kecamatan Arjasari, 2025

Tabel 2.3
Kondisi Kepegawaian berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2025

Pendidikan	Status Kepegawaian			Jenis Kelamin		Jumlah	Persentase
	PNS	PPPK	PHL	Laki-Laki	Perempuan		
SMA	4	1	6	10	1	11	48%
Diploma III	2	1	0	3	0	3	13%
S1	6	0	0	5	1	6	26%
S2	3	0	0	3	0	3	13%
Jumlah	15	2	6	21	2	23	100%

Sumber: Hasil Analisis Kecamatan Arjasari, 2025

Tabel 2.4
Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Kecamatan Arjasari
berdasarkan Eselon Jabatan
Tahun 2025

Eselon	Jenis Kelamin		Jumlah	Persentase
	Laki-Laki	Perempuan		
III a	1	0	1	11%
III b	1	0	1	11%
IV a	3	2	5	56%
IV b	2	0	2	22%
Jumlah	7	2	9	100%

Sumber: Hasil Analisis Kecamatan Arjasari, 2025

2.1.2.2.Sumber Daya Aset/BMD

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Arjasari dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa tanah, bangunan kantor, kendaraan, inventaris, dan fasilitas lainnya. Sarana dan prasarana tersebut sebagian dalam kondisi baik dan sebagian dalam kondisi kurang baik/rusak.

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari Berita Acara Rekonsiliasi Aset Periode 01 Januari s/d 31 Desember 2024 Kecamatan Arjasari sebagai berikut:

Tabel 2.5
Berita Acara Rekonsiliasi Aset Tahun 2024
Kecamatan Arjasari

Jenis Aset	Saldo Akhir Per 30 Desember 2024	Akumulasi Penyusutan Per 30 Desember 2024	Nilai Buku Per 30 Desember 2024
Tanah	0	84.600.000	84.600.000
Peralatan dan Mesin	989.550.938	1.243.274.037	253.723.099
Gedung dan Bangunan	519.783.007	2.180.181.229	1.660.398.222
Jalan, Irigasi dan Jaringan	125.565.847	152.338.600	26.772.753
Aset Tetap Lainnya	0	0	0
Kontruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0
Jumlah Aset Tetap	1.634.899.792	3.660.393.866	2.025.494.074
Aset Tak Berwujud	0	0	0
Aset Lain-Lain/Rusak Berat	1.048.807.335	1.031.420.429	17.386.906
Aset yang Dimanfaatkan Pihak Lainnya	0	0	0
Total Aset Lainnya	1.048.807.335	1.031.420.429	17.386.906
Total Aset Tetap + Aset Lainnya	4.709.201.201	2.666.320.221	2.042.880.980

Sumber: Hasil Analisis Kecamatan Arjasari, 2025

Renstra Kecamatan Arjasari disusun berdasarkan kebutuhan dan permasalahan yang ada di Kecamatan Arjasari. Pengadaan aset dan pemeliharaan diarahkan pada modernisasi alat kerja/penunjang kerja (*hardware, software*), dan pengadaan/pemeliharaan gedung dengan memperhatikan estetika, serta harus representatif dengan segala penunjang / pendukungnya sesuai ketentuan pada layanan publik.

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Arjasari

Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. Tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Arjasari dapat dilihat atau dicermati dalam Rencana Strategis (Renstra) periode sebelumnya (periode tahun 2021–2026) dimana Kecamatan Arjasari telah melaksanakan program dan kegiatan dengan indikator dan target yang harus dicapai.

2.1.3.1 Data-Data dan Informasi Terkait Pelaksanaan Urusan yang menjadi Tanggung Jawab Kecamatan Arjasari

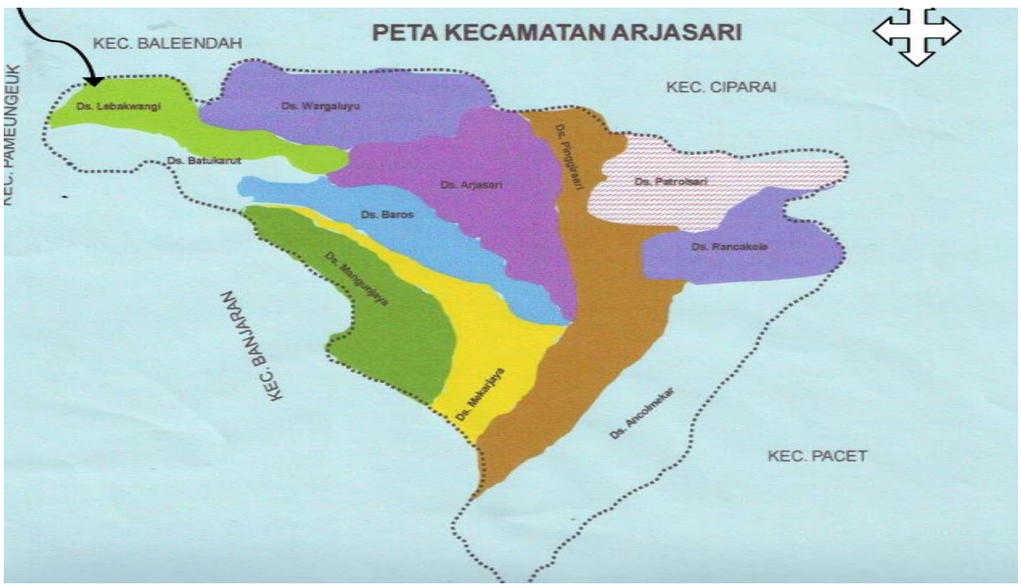
Kecamatan Arjasari memiliki luas ± 49,35 km2 atau 4.935 Ha2, dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1992 tentang Pembentukan 27 Kecamatan di Wilayah

Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon, Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi, Kabupaten Daerah Tingkat II Subang, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang dalam Wilayah Provinsi Jawa Barat.

Pada awalnya, beberapa desa di Arjasari merupakan bagian dari Kecamatan Pameungpeuk, sementara sebagian desa lainnya merupakan bagian dari Kecamatan Ciparay. Dengan adanya pemekaran, desa-desa tersebut digabungkan untuk membentuk Kecamatan Arjasari yang baru, dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan efektivitas pemerintahan di wilayah tersebut.

Kecamatan Arjasari merupakan salah satu kecamatan dari 31 kecamatan yang berada di wilayah di Kabupaten Bandung dengan memiliki luas ± 49,35 km2 atau 4.935 Ha2. Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung memiliki bentuk wilayah pegunungan yang berlereng atau daerah punggung bukit dengan ketinggian 600-950 meter di atas permukaan laut, dan beriklim tropis dengan curah hujan rata-rata 781 mm per tahun dengan jarak ke ibu kota provinsi 21 km, ke ibu kota kabupaten 15 km.

Gambar 2.2 Wilayah Kecamatan Arjasari



Sumber: Hasil Analisis Kecamatan Arjasari, 2025

Adapun batasan-batasan wilayah Kecamatan Arjasari adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara: Kecamatan Baleendah dan Kecamatan Pameungpeuk
- Sebelah Selatan: Kecamatan Banjaran
- Sebelah Timur: Kecamatan Ciparay dan Kecamatan Pacet
- Sebelah Barat: Kecamatan Pameungpeuk

Kecamatan Arjasari mempunyai ketinggian 600-950 m di atas permukaan laut (dpl), bertopografi berombak sampai berbukit, dengan suhu minimal 21^0 C, dan suhu maksimal 30^0 C. Wilayah Kecamatan Arjasari memiliki curah hujan rata-rata 781 mm / tahun. adapun bentuk wilayah Kecamatan Arjasari adalah sebagai berikut :

- Datar sampai berombak : 10 %
- Berombak sampai berbukit : 80 %
- Berbukit dapat bergunung : 10 %

Adapun Wilayah Kerja Kecamatan Arjasari sebagai Perangkat Daerah meliputi 11 (sebelas) Desa yang terdiri dari :

1. Desa Wargaluyu
2. Desa Batukarut
3. Desa Lebakwangi
4. Desa Baros
5. Desa Mangunjaya
6. Desa Mekarjaya
7. Desa Arjasari
8. Desa Patrolsari
9. Desa Pinggirsari
10. Desa Ancolmekar
11. Desa Rancakole

Data demografi Kecamatan Arjasari mencerminkan jumlah penduduk, sebaran jenis kelamin, serta komposisi pendidikan yang menjadi dasar penting dalam perencanaan pembangunan. Informasi ini tidak hanya menggambarkan kondisi terkini, tetapi juga menjadi acuan dalam memproyeksikan kebutuhan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan program pemberdayaan masyarakat lima tahun ke depan.

Secara keseluruhan, luas wilayah di kecamatan ini tersebar dengan satuan pengukuran dalam hektare, mencerminkan keragaman geografis dan administratif di Kecamatan Arjasari.

Tabel 2.6 Luas Wilayah dan Alamat Desa-Desa di Kecamatan Arjasari

NO	DESA	Luas Wilayah	Satuan Wilayah	Alamat
1	Batukarut	178	hektare	Jl. Raya Banjaran - Arjasari No.106
2	Mangunjaya	367	hektare	Jl. Raya Batukarut-Sadah No 1
3	Mekarjaya	322	hektare	Jl. Raya Mekarjaya No 1
4	Baros	420	hektare	Kp. Cimentrik Rt. 01 Rw. 07, Desa Baros
5	Lebakwangi	317	hektare	Jl. Raya Banjaran - Arjasari No.160
6	Wargaluyu	463	hektare	Jl.M.Adhikarta No 86
7	Arjasari	769	hektare	Jl. Raya Arjasari Km 5
8	Pinggirsari	871	hektare	Jl. Raya Pinggirsari No 1
9	Patrolsari	548	hektare	Jl. Raya Arjasari-Ciparay No 35
10	Rancakole	308	hektare	Jl. Raya Rancakole - Arjasari
11	Ancolmekar	372	hektare	Jl. Raya Ancolmekar No 1
TOTAL		4.935	hektare	

Sumber: Hasil Analisis Kecamatan Arjasari, 2025

Data luas wilayah desa di Kecamatan Arjasari menunjukkan variasi yang signifikan antar desa. Desa Lebakwangi tercatat sebagai desa dengan luas wilayah terbesar, yaitu 871 hektar, sementara Desa Batukarut memiliki luas wilayah terkecil, yaitu 178 hektar. Informasi ini menjadi dasar penting untuk memahami struktur spasial dan potensi pengembangan wilayah di tingkat desa.

Tabel 2.7 Kondisi Demografi di Kecamatan Arjasari Tahun 2025

No	Desa	Jumlah RW	Jumlah RT	Jumlah Penduduk	Jumlah Kepala Keluarga	Kepadatan Penduduk	Laki-Laki	Perempuan
1	Batukarut	21	62	11.473	3.515	6.446	5.805	5.668
2	Mangunjaya	20	80	8.981	3.365	2.447	4.566	4.415
3	Mekarjaya	19	80	6.785	2.760	2.107	3.470	3.315

No	Desa	Jumlah RW	Jumlah RT	Jumlah Penduduk	Jumlah Kepala Keluarga	Kepadatan Penduduk	Laki-Laki	Perempuan
4	Baros	19	74	11.191	3.361	2.665	5.737	5.454
5	Lebakwangi	14	53	13.517	3.721	4.264	6.833	6.684
6	Wargaluyu	13	60	9.058	3.658	1.956	4.570	4.488
7	Arjasari	13	52	12.848	3.318	1.671	6.467	6.381
8	Pinggirsari	12	55	12.602	3.403	1.447	6.465	6.137
9	Patrolsari	13	54	9.971	3.129	1.820	5.129	4.842
10	Rancakole	14	56	11.157	3.284	3.622	5.682	5.475
11	Ancolmekar	11	44	5.370	1.733	1.436	2.713	2.657
JUMLAH		169	670	112.953	35.247	2.289	57.437	55.516

Sumber : GIS Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, 2025

Kecamatan Arjasari memiliki jumlah penduduk sebanyak 112.953 jiwa yang tersebar di 11 desa, dengan total 169 RW, dan 670 RT. Kepadatan penduduk rata-rata di kecamatan ini adalah 2.289 jiwa per hektar. Jumlah penduduk laki-laki adalah 57.437 jiwa, sedikit lebih banyak dari jumlah penduduk perempuan yang berjumlah 55.516 jiwa. Desa Lebakwangi memiliki jumlah penduduk terbanyak, yaitu 13.517 jiwa. Terdapat 35.247 kepala keluarga di seluruh kecamatan. Data ini menggambarkan distribusi penduduk yang beragam antar desa di Kecamatan Arjasari, yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembangunan dan penyediaan layanan publik.

Tabel 2.8 Rekapitulasi Pendidikan di Kecamatan Arjasari

DESA	Tidak/Belum Sekolah	Belum Tamat SD	Tamat SD	SLTP	SLTA	D1 dan D2	D3	S1	S2	S3
Batukarut	803	917	1720	3441	2868	260	200	602	20	11
Mangunjaya	628	718	1347	2694	2245	210	150	472	15	9
Mekarjaya	474	542	1017	2035	1696	166	106	356	10	7
Baros	783	895	1678	3357	2797	254	194	588	19	11
Lebakwangi	946	1081	2027	4055	3379	300	240	710	25	13
Wargaluyu	634	724	1358	2717	2264	211	151	476	15	9
Arjasari	899	1027	1927	3854	3212	286	226	675	21	13
Pinggirsari	882	1008	1890	3780	3150	282	222	662	20	13
Patrolsari	697	797	1495	2991	2492	229	169	523	16	10
Rancakole	780	892	1673	3347	2789	253	193	586	19	11
Ancolmekar	375	429	805	1611	1342	137	77	282	9	5

Sumber : GIS Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, 2025

Secara keseluruhan, rekapitulasi data pendidikan di desa-desa Kecamatan Arjasari memperlihatkan adanya disparitas signifikan dalam tingkat pendidikan penduduk. Sebagian besar penduduk masih berada pada jenjang SLTP dan SLTA. Sementara itu, jumlah penduduk yang melanjutkan ke jenjang D1 dan D2 juga bervariasi antar desa. Partisipasi

pendidikan tinggi, khususnya hingga jenjang S2 dan S3 masih sangat terbatas. Hal ini mengindikasikan adanya tantangan dalam akses dan kelanjutan pendidikan di wilayah Kecamatan Arjasari. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih serius untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan agar lebih banyak warga desa dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga dapat mendukung kemajuan dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Kedudukan Kecamatan Arjasari berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan Arjasari mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Adapun Kinerja Pelayanan Kecamatan Arjasari adalah sebagai berikut:

1. Kinerja pelayanan di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat:
   a. Pembinaan terhadap anggota satgas linmas yang berada di desa.
   b. Pembinaan siskamling di tingkat desa, dusun atau lingkungan sampai pada tingkat RT dan RW.
   c. Patroli rutin gabungan Muspika dan dinas terkait serta desa untuk melihat langsung aktifitas masyarakat dalam bersiskamling.
   d. Mengadakan sosialisasi peraturan perundang-undangan di seluruh desa bersama dengan jajaran Muspika dan dinas atau instasi terkait.
   e. Mengadakan kegiatan operasi dan penertiban bersama Muspika dan instansi terkait.
   f. Mengadakan pembinaan kepada pemerintah desa untuk membuat peraturan desa sebagai dasar atau payung hukum di tingkat desa.
   g. Melaksanakan PAM tahun baru oleh tim gabungan dari Polri, Dishub, TNI, PMK, dan Satpol PP.
   h. Melaksanakan kegiatan lainnya seperti perayaan HUT Kemerdekaan RI, karnaval umum, PAM lebaran.
   i. Melaksanakan PPKM di wilayah Kecamatan Arjasari, untuk mencegah peningkatan penyebaran Covid-19.
2. Kinerja pelayanan di bidang pemerintahan
   a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di kecamatan melalui PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan).

b. Pembinaan dan pembenahan administrasi pelayanan di kecamatan dan desa.
c. Pembinaan terhadap aparat kecamatan dan perangkat desa secara rutin.
d. Memberikan kesempatan kepada aparat kecamatan dan desa untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang di laksanakan pemerintah kabupaten maupun pihak lainnya.
e. Pembinaan kelengkapan administrasi desa termasuk pendampingan membuat Perdes tentang APBDes, dan susunan administasi dan tata laksana pemerintahan desa.
f. Mengikutsertakan pada kegiatan-kegiatan pelatihan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perangkat desa.
g. Memberikan sosialisasi bagi perangkat desa dan kelurahan terkait dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan.

3. Kinerja pelayanan di bidang pembangunan
   a. Pembinaan dan pelaksanaan program pembangunan pola kemitraan antara lain dengan memfasililtasi, membina dan membantu kegiatan peningkatan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berbasis masyarakat.
   b. Memfasilitasi, membina, dan membantu kegiatan revitalisasi pertanian.
   c. Pemantauan kegiatan perluasan rehabilitasi dan normalisasi jaringan irigasi.
   d. Memfasilitasi, pembinaan dan memantau kegiatan pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah.
   e. *Monitoring* pelaksanaan musrenbang desa dan melaksanakan musrenbang kecamatan.
   f. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana strategis, reviu kecamatan, dengan seluruh elemen di tingkat kecamatan.
   g. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi rencana pembangunan di desa dengan melibatkan para tokoh masyarakat.
4. Kinerja pelayanan di bidang pemasyarakatan
   a. Pelestarian lingkungan hidup dengan gerakan penghijauan, gerakan kebersihan, ketertiban, dan keindahan di wilayah kecamatan.

b. Memfasilitasi, membina, dan memantau kegiatan sanitasi masyarakat (SANIMAS).
c. Memfasilitasi dan me*monitoring* pengelolaan tempat pengolah sampah.
d. Pembinaan, koordinasi, dan sinkronisasi gerakan keluarga berencana serta kesehatan.
e. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan posyandu.
f. Pembinaan, koordinasi, dan sinkronisasi pendanaan keluarga sejahtera.
g. Pembinaan, koordinasi, dan harmonisasi lembaga-lembaga keagamaan.
h. Memfasilitasi pembangunan tempat-tempat ibadah.
i. Pelaksanaan peringatan hari-hari besar keagamaan.
j. Pembinaan di bidang kepemudaan yang terkait kegiatan olahraga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat, dan keluarga berncana.
k. Pembinaan dan penyuluhan kepada pemuda tentang wawasan kebangsaan, serta peningkatan peraturan pemuda terkait masalah sosial budaya, ketenagakerjaan dan kemasyarakatan.
l. Pembinaan dan penyuluhan pembangunan yang berwawasan lingkungan, membantu penanganan masalah-masalah social, dan bencana alam.

Selain itu pelaksanaan Tugas Pokok Camat sebagai Perangkat Daerah adalah membantu Bupati dalam Bidang Pemerintahan Daerah yang kegiatannya mengacu pada Keputusan Bupati Bandung Nomor 137/KEP.769-TAPEM/2023 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah. Adapun rincian Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan yang Menjadi Kewenangan Daerah antara lain:

Tabel 2.9 Jenis Kewenangan yang dilimpahkan Kepada Kecamatan

Urusan	Jenis Kewenangan yang Dillimpahkan
Pendidikan	1. Fasilitasi keikutsertaan warga masyarakat dalam pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan kesetaraan 2. *Monitoring* dan Fasilitasi Kelayakan sarana dan prasarana pendidikan dasar di wilayah Kecamatan
Kesehatan	3. Fasilitasi penanggulangan masalah kesehatan masyarakat tingkat kecamatan 4. *Monitoring* dan fasilitasi kelayakan sarana dan prasarana Puskesmas, Poskesdes, dan Puskesmas Pembantu di Wilayah Kecamatan
Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	5. Fasilitasi pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
Sosial	6. Penanganan pertama penyediaan kebutuhan dasar mendesak masyarakat pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7. Penyelenggaraan pembinaan organisasi perempuan tingkat kecamatan 8. *Monitoring* dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan
Pertanahan	9. Fasilitasi penyelenggaraan pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum
Lingkungan Hidup	10. Pengelolaan sampah skala Kecamatan 11. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Skala Kecamatan 12. Fasilitasi pembinaan desa/kelurahan berbudaya lingkungan 13. Fasilitasi pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14. *Monitoring* dan Fasilitasi Penyelenggaraan layanan dan kelayakan sarana prasarana yang digunakan dalam pelayanan dokumen kependudukan dan catatan sipil
Pemberdayaan masyarakat dan desa	15. Peresmian anggota Badan Pemusyawaratan Desa, Peresmian pemberhentian anggota Badan Pemusyawaratan Desa, Memandu pengucapan serta penandatanganan berita acara sumpah janji anggota Badan Permusyawaratan Desa, Evaluasi Rancangan peraturan desa, Klarifikasi Peraturan Desa
Komunikasi dan Informatika	16. *Monitoring* dan fasilitasi kelayakan akses jaringan internet lingkungan kantor kecamatan, Desa/Kelurahan dan fasilitas umum di wilayah kecamatan
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	17. Fasilitasi pengembangan koperasi dan UMKM Skala Kecamatan 18. Promosi produk unggulan UMKM skala Kecamatan
Penanaman Modal	19. Fasilitasi dan pendampingan pengajuan Nomor Induk Berusaha (NIB)

Urusan	Jenis Kewenangan yang Dillimpahkan
	20. *Monitoring* kegiatan pemanfaatan tanah sesuai perizinan yang diterbitkan di wilayah Kecamatan
Kepemudaan dan Olahraga	21. Pembinaan Keolahragaan tingkat kecamatan 22. Pembinaan Kepemudaan tingkat Kecamatan
Kebudayaan	23. Pemajuan seni dan budaya tingkat Kecamatan 24. Penyelenggaraan pagelaran seni dan budaya tingkat Kecamatan
Pariwisata	25. Pengembangan potensi dan budaya lokal tingkat kecamatan sebagai destinasi wisata 26. Fasilitasi pengembangan desa wisata dan kampung wisata 27. Pengembangan ekonomi kreatif bidang pariwisata skala kecamatan
Pertanian	28. *Monitoring* dan fasilitasi kelayakan sarana dan prasarana pertanian

Sumber: Keputusan Bupati Bandung Nomor 137/KEP.769-TAPEM/2023

B. Potensi Kecamatan

Kecamatan Arjasari merupakan salah satu wilayah strategis di Kabupaten Bandung yang memiliki beragam potensi untuk dikembangkan, baik dari aspek geografis, sumber daya alam, ekonomi, maupun sosial budaya. Secara geografis dan lokasi, Kecamatan Arjasari berada pada jalur penghubung antara pusat Kabupaten Bandung dengan wilayah sekitarnya, sehingga memiliki posisi yang cukup strategis dalam mendukung mobilitas masyarakat, perdagangan, serta distribusi barang dan jasa.

Dari sisi sumber daya alam (SDA), wilayah Kecamatan Arjasari memiliki lahan pertanian produktif yang mendukung komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Potensi irigasi serta ketersediaan air dari jaringan sumber daya air juga memperkuat sector pertanian sebagai salah satu penopang utama ekonomi masyarakat. Selain itu, keberadaan badan air dan kawasan lindung memberikan peluang untuk pengembangan ekowisata maupun pemanfaatan lingkungan secara berkelanjutan

Dari aspek ekonomi dan UMKM, Kecamatan Arjasari memiliki basis usaha mikro, kecil, dan menengah yang cukup beragam. Sektor kuliner mendominasi, diikuti dengan agrobisnis, fashion, kerajinan, dan usaha lainnya. Hal ini menunjukkan adanya keragaman ekonomi masyarakat yang kuat serta peluang pengembangan kewirausahaan lokal yang dapat didukung dengan fasilitasi pemerintah dalam hal pemasaran, digitalisasi, maupun peningkatan kapasitas pelaku usaha

Dalam bidang pariwisata, keberadaan desa wisata seperti Desa Wargaluyu, dan Desa Baros menjadi potensi besar yang dapat

dikembangkan. Desa-desa tersebut menawarkan keunikan potensi alam, budaya, serta produk lokal masyarakat. Keberadaan desa wisata ini membuka peluang pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat identitas lokal.

Dari aspek sosial dan budaya, Kecamatan Arjasari memiliki situs Bumi Alit Kabuyutan yang berada di Desa Lebakwangi, dan merupakan salah satu situs cagar budaya yang berada di wilayah Kabupaten Bandung. Selain itu, masyarakat Kecamatan Arjasari dikenal memiliki ikatan sosial yang kuat dengan semangat gotong royong yang masih terjaga dalam kehidupan sehari-hari. Potensi seni budaya lokal, seperti seni pertunjukan, musik tradisional, serta kerajinan tangan, menjadi aset yang dapat dikembangkan dalam rangka memperkuat karakter daerah sekaligus membuka peluang ekonomi kreatif.

Secara keseluruhan, potensi Kecamatan Arjasari mencerminkan peluang besar untuk dikembangkan dalam berbagai sektor. Perencanaan yang tepat dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan akan menjadi kunci utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.1.3.2 Penyajian Hasil Evaluasi Capaian Pelaksanaan IKU dan IKK Tahun 2021-2024

Tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Arjasari dapat dilihat atau dicermati dalam Renstra periode sebelumnya (periode tahun 2020 – 2024). Hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan dilakukan dengan melihat bagaimana kinerja pelayanan Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung pada 5 tahun terakhir yang berhubungan dengan pencapaian Indikator Sasaran Strategis selama periode tahun 2020 sampai tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.10 Target, Realisasi dan Capaian Tujuan dan Sasaran Kecamatan Arjasari Tahun 2021-2026

No	Indikator Sasaran Strategis	Target Renstra Kecamatan Arjasari					Realisasi Capaian					Catatan Analisis
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	2023 (thn n-2)	2024 (thn n-1)	
1	Indeks kepuasan masyarakat	81 poin	82 poin	83 poin	84 poin	84.3 poin	81 poin	82 poin	83.01 poin	84,01 poin	89.85 poin	
2	Persentase BMD dalam kondisi baik	58%	59%	60%	65%	70%	58%	80%	80.01%	75,1%	78.2%	
3	Nilai Akip Kecamatan Arjasari	59 poin	60 poin	61 poin	66 poin	73 poin	60 poin	61.1 poin	65.85 poin	72.8 poin	75.35 poin	
4	Persentase Desa yang Beradministrasi baik	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	0%	
5	Jumlah Desa Cepat Berkembang	0 Desa	0 Desa	0 Desa	0 Desa	1 Desa	0 Desa	0 Desa	0 Desa	0 Desa	2 Desa	

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Arjasari, 2025

Berdasarkan Tabel 2.10 di atas, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Arjasari pada periode 2020–2024 menunjukkan perkembangan yang positif. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 60 dan terealisasi 61.1. Pencapaian ini terus meningkat pada tahun 2022 dengan target 61 dan realisasi sebesar 65,85. Tahun 2023 target sebesar 66 tercapai penuh dengan realisasi 72,8, sedangkan pada tahun 2024 target 73 terlampaui dengan realisasi 75,35. Hal ini mencerminkan peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja secara konsisten.

Selanjutnya, indikator persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik juga menunjukkan capaian yang melebihi target. Pada tahun 2021, target sebesar 59 berhasil direalisasikan sebesar 80. Pada tahun 2022, target 60 tercapai dengan realisasi 80,01. Tahun 2023 target 65 tercapai dengan realisasi 75,1, sementara pada tahun 2024 target 70 berhasil terlampaui dengan realisasi 78,2.

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pun relatif stabil dan cenderung meningkat. Pada tahun 2021 target 82 terealisasi sebesar 82, sedangkan pada tahun 2022 target 83 tercapai dengan realisasi 83,01. Pada tahun 2023, target 84 tercapai dengan realisasi 84,01. Sementara itu, pada tahun 2024 target 84,3 berhasil dilampaui dengan realisasi sebesar 89,85. Hal ini menunjukkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Kecamatan Arjasari yang terus meningkat.

Selain itu, indikator persentase desa yang beradministrasi baik juga memperlihatkan pencapaian optimal. Pada tahun 2022 dan 2023, target 100% tercapai sepenuhnya, meskipun pada tahun 2021 dan 2024 tidak terdapat data. Sementara itu, jumlah desa cepat berkembang baru

tercatat pada tahun 2024, dengan target 1 desa dan terrealisasi sebanyak 2 desa.

Secara keseluruhan, capaian IKU Kecamatan Arjasari dari tahun 2021 hingga 2024 menunjukkan tren positif dengan realisasi yang umumnya melampaui target. Hal ini menggambarkan adanya peningkatan kinerja pemerintahan kecamatan baik dari aspek akuntabilitas, pengelolaan aset daerah, kualitas pelayanan publik, maupun tata kelola administrasi desa.

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja, serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu hal pertama yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian, kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU menjadi ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Yang dengan kata lain, IKU adalah ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Arjasari Tahun 2020 sampai Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Dalam melaksanakan program kegiatan terutama pelayanan langsung terhadap masyarakat, perlu adanya penilaian yang objektif terutama penilaian langsung dari masyarakat. Dalam hal ini, setiap tahunnya Kecamatan Arjasari melaksanakan SPM 3 kali dalam setahun, dengan Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai orientasinya. Dari penilaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tersebut, hasil rata – rata pencapaian telah melampaui target, hal tersebut memberikan gambaran bahwa dengan sumber daya yang ada, Kecamatan Arjasari dapat memberikan layanan dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa kekurangan dan kelemahan. Hal ini tentu menjadi modal, untuk

perbaikan pada tahun-tahun mendatang. Target dan capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.11

Pencapaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung

No	Indikator Sasaran Strategis	Target Renstra Kecamatan Arjasari					Realisasi Capaian					Catatan Analisis
		Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	2023	2024	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	(thn n-2)	(thn n-1)	
1	Indeks kepuasan masyarakat	81 poin	82 poin	83 poin	84 poin	84.3 poin	81 poin	82 poin	83.01 poin	84,01 poin	89.85 poin	

Sumber : Hasil analisis Kecamatan Arjasari, 2025

Berdasarkan Tabel 2.11, capaian indeks kepuasan masyarakat di Kecamatan Arjasari selalu melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini terlihat dari capaian tahun 2020 hingga 2024, dimana pada tahun 2020 ditetapkan target 81 poin dan terealisasi sebesar 81 poin; pada tahun 2021 ditetapkan target 82 poin dan terealisasi sebesar 82 poin; pada tahun 2022 ditetapkan target 83 poin dan terealisasi sebesar 83,01 poin; pada tahun 2023 ditetapkan target 84 poin dan terealisasi sebesar 84,01 poin; pada tahun 2024 ditetapkan target 84,3 poin dan terealisasi sebesar 89,85 poin.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kecamatan Arjasari telah melaksanakan kewenangan yang menjadi faktor pendorong untuk melaksanakan kebijakan, baik di tingkat pusat mapun daerah. Dengan adanya kewenangan baik atributif maupun delegatif kepada Camat Arjasari tersebut, maka kegiatan rutin dan kewilayahan dapat dilaksanakan, dengan sumber pembiayaan berasal dari APBD Kabupaten Bandung, melalui alokasi pada DPA Kecamatan Arjasari.

b.Jumlah Desa Cepat Berkembang

Program dan kegiatan yang terkait dengan indikator ini telah dilaksanakan, meskipun belum optimal. Tetapi, dari sisi kewenangan ini, khususnya terhadap pembinaan lembaga desa, telah terjadi peningkatan pada desa yaitu perubahan desa maju menjadi desa mandiri (bertambah 2 Desa). Disisi lain dengan kewenangannya, Camat Arjasari telah melaksanakan fasilitasi dan koordinasi sehingga pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2024 berjalan dengan tertib, aman dan

terkendali. Selain itu, bentuk kewenangan lain yang dilaksanakan adalah memfasilitasi perbaikan sarana umum yang rusak, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan, dengan melakukan koordinasi dan pembinaan. Target dan capaian indikator jumlah desa cepat berkembang pada tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.12

Pencapaian Indikator Jumlah Desa Cepat Berkembang Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung

No	Indikator Sasaran Strategis	Target Renstra Kecamatan Arjasari					Realisasi Capaian					Catatan Analisis
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	2023 (thn n-2)	2024 (thn n-1)	
1	Jumlah Desa Cepat Berkembang	0 Desa	0 Desa	0 Desa	0 Desa	1 Desa	0 Desa	0 Desa	0 Desa	0 Desa	2 Desa	

Sumber : Hasil analisis Kecamatan Arjasari, 2025

Berdasarkan Tabel 2.12, jumlah desa cepat berkembang di Kecamatan Arjasari, terlihat bahwa dari tahun 2020 hingga 2023 tidak ada desa yang masuk kategori cepat berkembang, dengan persentase tetap di angka 0%. Hal ini karena indikator jumlah desa cepat berkembang baru ditetapkan menjadi IKU pada perubahan Renstra tahun 2024. Sehingga, pada tahun 2024 terjadi peningkatan yang sangat signifikan, di mana terdapat 2 desa di Kecamatan Arjasari berhasil masuk dalam kategori desa cepat berkembang dengan persentase mencapai 200%. Perubahan ini diharapkan dapat mendukung kemajuan yang pesat dalam pembangunan dan pengembangan desa di Kecamatan Arjasari, yang berpotensi meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal secara lebih efektif.

2.1.3.3 Penyajian Hasil Evaluasi Capaian dan Kinerja Yang Menjadi Tanggung Jawab Kecamatan Arjasari Pada Renstra Tahun 2021-2026 Mencakup Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan

Tingkat capaian kinerja kegiatan rutin maupun kegiatan strategis Kecamatan Arjasari dengan berdasarkan pada sasaran / target Renstra Tahun 2021 - 2026 disajikan pada Tabel 2.13 dan Tabel 2.14 berikut ini:

Tabel 2.13
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Arjasari
Kabupaten Bandung

No	Progeram/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	59 Point	60 Point	61 Point	66 Point	73 Point	60 Point	61,1 Point	65,85 Point	72,8 Point	75,35 Point	101.69%	101.83%	107.95%	110.3%	103.21 %
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	100%	100%	100%	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	100%	100%	100%	100%
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	100%	100%	100%	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	100%	100%%	100%	100%
	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0.00%	0.00%	0.00%	0%	0.00%
	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0.00%	0.00%	0.00%	0%	0.00%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	100%	100%	100%	100%

No	Progeram/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	100%	100%	100%	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 dokumen	1 Laporan	1 dokumen	1 Laporan	4 Laporan	1 dokumen	1 Laporan	1 dokumen	1 Laporan	4 Laporan	100%	100%	100%	100%	100%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0.00%	100%	0%	100%	100%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	21 Stel	21 Paket	21 Stel	21 Paket	21 Paket	21 Stel	21 Paket	21 Stel	21 Paket	21 Paket	100%	100%	100%	100%	100%
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	21 Orang	21 Orang	21 Orang	21 Orang	21 Orang	21 Orang	21 Orang	21 Orang	21 Orang	21 Orang	100%	100%	100%	100%	100%
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	21 Orang	21 Orang	21 Orang	21 Orang	21 Orang	21 Orang	21 Orang	21 Orang	21 Orang	21 Orang	100%	100%	100%	100%	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Pelaksanaan pelayanan Administrasi Umum yang maksimal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 jenis	1 Paket	12 jenis	1 Paket	3 Paket	12 jenis	1 Paket	12 jenis	1 Paket	3 Paket	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	46 jenis	20 Paket	46 jenis	20 Paket	20 Paket	46 jenis	20 Paket	46 jenis	20 Paket	20 Paket	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 jenis	2 Paket	1 jenis	2 Paket	2 Paket	1 jenis	2 Paket	1 jenis	2 Paket	2 Paket	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	0 Paket	0 Paket	0 Paket	0 Galon	0 Paket	0 Galon	0 Paket	0 Paket	0.00%	0.00%	0%	0%	0%

No	Progeram/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 jenis	2 Paket	2 jenis	2 Paket	2 Paket	2 jenis	2 Paket	2 jenis	2 Paket	2 Paket	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Bulan	12 Dokumen	12 Bulan	12 Dokumen	2 Dokumen	12 Bulan	12 Dokumen	12 Bulan	12 Dokumen	2 Dokumen	100%	100%	100%	100%	100%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Bulan	12 Laporan	12 Bulan	12 Laporan	2 Laporan	12 Bulan	12 Laporan	12 Bulan	12 Laporan	2 Laporan	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	12 Laporan	12 Bulan	12 Laporan	3 Laporan	12 Bulan	12 Laporan	12 Bulan	12 Laporan	3 Laporan	100%	100%	100%	100%	100%
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase BMD dalam Kondisi baik	58%	59%	60%	65%	70%	58 %	80 %	80,01 %	75,1 %	78,2 %	100%	135%	133%	115%	111%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 set	1 Paket	2 set	1 Paket	3 Paket	2 set	1 Paket	2 set	1 Paket	3 Paket	100 %	100%	100%	100%	100%
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 jenis	1 Unit	1 jenis	1 Unit	1 Unit	1 jenis	1 Unit	1 jenis	1 Unit	1 Unit	100%	100 %	100%	100%	100%
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0,00 %	0,00 %	0%	0%	0%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0,00 %	0,00 %	0%	0%	0%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	12 Laporan	12 bulan	12 Laporan	12 Laporan	12 bulan	12 Laporan	12 bulan	12 Laporan	12 Laporan	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 bulan	12 Laporan	12 bulan	12 Laporan	12 Laporan	12 bulan	12 Laporan	12 bulan	12 Laporan	12 Laporan	100%	100%	100%	100%	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	16 unit	0 Kendaraan	16 unit	7 Kendaraan	7 Kendaraan	16 unit	0 Kendaraan	16 unit	7 Kendaraan	7 Kendaraan	100%	0.00%	100%	100%	100%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	2 Unit	5 Unit	2 Unit	2 Unit	5 Unit	2 Unit	5 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	100%	100%	100%	100%

No	Progeram/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	0 Unit	2 Unit	3 Unit	1 Unit	2 Unit	0 Unit	2 Unit	3 Unit	1 Unit	100%	0.00%	100%	100%	100%
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	81	82	83	84	84,3	81	82	83,01	84,01	89,85	100.00%	100.00%	100%	100%	106%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	81	82	83	84	84,3	81	82	83,01	84,01	89,85	100.00%	100.00%	100%	100%	106%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.00%	0.00%	0%	0%	0%
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0.00%	0.00%	0%	0%	0%
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 Kegiatan	1 dokumen	1 Kegiatan	1 dokumen	1 dokumen	100%	100%	100%	100%	100%
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	1 Kegiatan	1 Laporan	1 Kegiatan	1 Laporan	4 Laporan	100%	100%	100%	100%	100%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Progeram/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0.00%	0%	0%	0%	0%
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	0 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	0.00%	100%	0%	100%	100%
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Kegiatan	1 Laporan	1 Kegiatan	1 Laporan	2 Laporan	1 Kegiatan	1 Laporan	1 Kegiatan	1 Laporan	2 Laporan	100%	100%	100%	100%	100%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	250 Orang	250 Orang	250 Orang	250 Orang	0 Orang	250 Kegiatan	250 Orang	250 Kegiatan	250 Orang	0 Orang	100%	100%	100%	100%	0%
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	250 Orang	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	250 Orang	0%	0%	0%	0%	100%

No	Progeram/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	0 Orang	220 Orang	0 Orang	220 Orang	220 Orang	0 Orang	220 Orang	0 Orang	220 Orang	220 Orang	0%	100%	0%	100%	100%
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	0 Dokumen	12 Dokumen	0 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	0 Dokumen	12 Dokumen	0 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	0.00%	100%	0%	100%	100%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa Beradministrasi Baik	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	0%
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Desa Cepat Berkembang	0 Desa	0 Desa	0 Desa	0 Desa	1 Desa	0 Desa	0 Desa	0 Desa	0 Desa	2 Desa	0.00%	0.00%	0%	0%	200%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Capaian Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	0.00%	100%	0%	100%	100%
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	0%	100%	0%	100%	100%
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Kegiatan	2 Laporan	2 Kegiatan	2 Laporan	0 Laporan	100%	100%	100%	100%	100%
	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	2 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	2 Laporan	0.00%	0.00%	0%	0%	100%
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase keluarga yg terfasilitasi	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.00%	0.00%	0%	0%	0%
	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0.00%	0.00%	0%	0%	0%

No	Progeram/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0.00%	0.00%	0%	0%	0%
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0.00%	0.00%	0%	0%	0%
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0.00%	0.00%	0%	0%	0%
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0.00%	0.00%	0%	0%	0%
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0.00%	0.00%	0%	0%	0%
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang dibina	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Kegiatan	2 Dokumen	1 Kegiatan	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Kegiatan	2 Dokumen	1 Kegiatan	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	100%	100%	100%	100%
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Kegiatan	2 Dokumen	1 Kegiatan	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Kegiatan	2 Dokumen	1 Kegiatan	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	100%	100%	100%	100%
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Desa	1 Dokumen	0 Desa	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Desa	1 Dokumen	0 Desa	1 Dokumen	0 Dokumen	0.00%	100%	0%	100%	0%
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Kegiatan	5 Dokumen	1 Kegiatan	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Kegiatan	5 Dokumen	1 Kegiatan	5 Dokumen	2 Dokumen	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Hasil Analisis Kecamatan Arjasari, 2025

Indikator yang tertuang dalam tabel di atas merupakan indikator sebagaimana terdapat dalam Renstra Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu nilai IKM, tahun 2020 sampai 2024 tercapai diatas 100%. Begitu pula halnya dengan Nilai AKIP mencapai di atas target. Tahun 2020, Nilai AKIP terealisasi 60 poin (dari target 59 poin), Tahun 2021, Nilai AKIP terealisasi 61,1 Poin (dari target 60 poin). Tahun 2022 target AKIP adalah 61,1 terrealisasi 65,85 dengan capaian sebesar 107,95%. Di tahun 2023 target nilai AKIP sebesar 66,00 dan terealisasi sebesar 72,80, sehingga capaian sebesar 110,30%. Di tahun 2024, target Nilai AKIP sebesar 73,00, terealisasi 75,35, sehingga capaian Nilai AKIP tahun 2024 adalah 103,21%. Disini dapat dilihat bahwa Nilai AKIP dari tahun ke tahun semakin baik capaiannya. Keberhasilan nilai IKU dari indikator Nilai IKM dan Nilai AKIP disebabkan adanya keselarasan antara perencanaan dan realisasi kinerja, koordinasi yang baik antar unit kerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan, pelayan prima yang telah diberikan kepada masyarakat oleh aparatur kecamatan yang lebih baik. Selain faktor pendorong juga terdapat faktor penghambat yang umum yaitu adanya perubahan dalam perencanaan dan penganggaran.

Pencapaian anggaran sebagai pendukung kinerja pelayanan Kecamatan Arjasari tercantum pada tabel berikut:

Tabel 2.14
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung

Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(12)	(13)	(14)	(17)	(18)
Belanja Daerah	5,325,859,000	4,940,126,541	5,757,868,514	6,010,015,281	5,335,887,000	4,485,667,293	4,521,926,745	5,571,963,209	84.22%	91.53%	96.77%	0.62%	-54.51%
Belanja Operasi	5,152,861,000	4,917,254,841	5,278,620,974	5,825,945,491	5,335,887,000	4,312,669,293	4,499,055,045	5,092,715,669	83.69%	91.50%	96.48%	1.18%	-54.33%
Belanja Pegawai	4,371,415,000	3,918,790,529	3,924,267,800	4,343,343,993	4,167,528,000	3,611,827,621	3,513,619,196	3,763,376,196	82.62%	89.66%	95.90%	-0.90%	-53.64%
Belanja Barang dan Jasa	781,446,000	998,464,312	1,354,353,174	1,482,601,498	1,168,359,000	700,841,672	985,435,849	1,329,339,473	89.69%	98.70%	98.15%	12.92%	-57.31%
Belanja Modal	172,998,000	22,871,700	479,247,540	184,069,790	0	172,998,000	22,871,700	479,247,540	100.00%	100.00%	100.00%	436.75%	#DIV/0!
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22,998,000	22,871,700	166,559,400	129,262,330	0	22,998,000	22,871,700	166,559,400	100.00%	100.00%	100.00%	126.32%	#DIV/0!
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	150,000,000	0	312,688,140	54,807,460	0	150,000,000	0	312,688,140	100.00%	#DIV/0!	100.00%	#DIV/0!	#DIV/0!
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,984,115,000	4,409,654,861	4,945,182,841	5,118,936,862	4,752,988,000	4,179,822,708	3,992,321,845	4,760,335,809	83.86%	90.54%	96.26%	-0.75%	-54.13%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75,000,000	41,824,332	39,381,841	40,145,900	40,000,000	43,343,900	41,614,000	37,474,400	57.79%	99.50%	95.16%	-12.12%	-50.49%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15,000,000	5,900,000	9,381,841	10,000,000	10,000,000	9,381,841	9,381,841	9,194,600	62.55%	159.01%	98.00%	1.23%	-63.91%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	5,274,332	5,000,000	5,000,000	5,000,000		5,100,000	5,000,000	#DIV/0!	96.69%	100.00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	0	1,560,000	5,000,000	2,000,000	5,000,000	0	1,560,000	4,490,000	#DIV/0!	100.00%	89.80%	#DIV/0!	#DIV/0!
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60,000,000	29,090,000	20,000,000	20,000,000	18,000,000	28,350,400	29,054,000	18,789,800	47.25%	99.88%	93.95%	-23.19%	-48.22%
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0	0	0	2,000,000	1,000,000	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	0	0	0	1,145,900	1,000,000	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,377,415,000	3,923,630,529	3,928,267,800	4,347,343,992	4,171,528,000	3,617,747,721	3,513,619,196	3,767,376,196	82.65%	89.55%	95.90%	-0.91%	-53.62%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,371,415,000	3,918,790,529	3,924,267,800	4,343,343,992	4,167,528,000	3,611,827,621	3,508,779,196	3,763,376,196	82.62%	89.54%	95.90%	-0.90%	-53.61%

Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(12)	(13)	(14)	(17)	(18)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2,000,000	2,620,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,970,000	2,620,000	2,000,000	98.50%	100.00%	100.00%	1.83%	-59.70%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4,000,000	2,220,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	3,950,100	2,220,000	2,000,000	98.75%	100.00%	100.00%	-13.60%	-59.75%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0	7,000,000	0	3,200,000	1,000,000	0	0	0	#DIV/0!	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	7,000,000	0	3,200,000	1,000,000	0	0	0	#DIV/0!	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	0	9,543,000	33,140,000	47,000,000	0	0	9,428,000	#DIV/0!	#DIV/0!	98.79%	#DIV/0!	#DIV/0!
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0	0	0	7,000,000	7,000,000	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	9,543,000	13,070,000	20,000,000	0	0	9,428,000	#DIV/0!	#DIV/0!	98.79%	#DIV/0!	#DIV/0!
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	13,070,000	20,000,000	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Administrasi Umum Perangkat Daerah	88,000,000	116,553,000	231,620,000	226,800,000	107,000,000	86,687,100	116,297,100	228,443,475	98.51%	99.78%	98.63%	19.07%	-59.38%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,000,000	5,000,000	5,000,000	4,000,000	4,000,000	4,996,500	5,000,000	4,998,200	99.93%	100.00%	99.96%	-5.00%	-59.98%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40,000,000	51,702,000	163,160,000	150,000,000	35,000,000	39,715,600	51,548,300	160,822,300	99.29%	99.70%	98.57%	40.03%	-59.51%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4,000,000	6,100,000	8,000,000	7,000,000	7,000,000	3,998,000	6,099,100	7,961,575	99.95%	99.99%	99.52%	17.79%	-59.89%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5,000,000	3,600,000	4,000,000	3,000,000	3,000,000	5,000,000	3,600,000	3,990,400	100.00%	100.00%	99.76%	-10.47%	-59.95%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,300,000	1,999,700	2,000,000	65.00%	99.99%	100.00%	0.00%	-53.00%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2,000,000	3,380,000	4,460,000	4,000,000	4,000,000	1,837,000	3,372,000	3,806,000	91.85%	99.76%	85.34%	22.66%	-55.39%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	0	2,420,000	0	5,000,000	2,000,000	0	2,420,000	0	#DIV/0!	100.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30,000,000	42,351,000	45,000,000	51,800,000	50,000,000	29,840,000	42,258,000	44,865,000	99.47%	99.78%	99.70%	14.77%	-59.79%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	39,526,000	25,000,000	1000000	0	0	39,526,000	#DIV/0!	#DIV/0!	100.00%	#DIV/0!	#DIV/0!

Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(12)	(13)	(14)	(17)	(18)
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Pengadaan Mebel	0	0	39,526,000	25,000,000	1000000	0	0	39,526,000	#DIV/0!	#DIV/0!	100.00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	264,700,000	284,997,000	332,780,000	316,460,000	296,460,000	255,720,987	278,148,321	317,206,304	96.61%	97.60%	95.32%	3.30%	-57.90%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,000,000	4,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,800,000	3,992,800	1,990,000	90.00%	99.82%	99.50%	12.50%	-57.86%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20,000,000	36,000,000	35,000,000	36,000,000	16,000,000	11,244,315	29,209,121	26,155,664	56.22%	81.14%	74.73%	6.13%	-42.42%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	242,700,000	244,997,000	295,780,000	278,460,000	278,460,000	242,676,672	244,946,400	289,060,640	99.99%	99.98%	97.73%	3.95%	-59.54%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	179,000,000	35,650,000	364,064,200	126,846,970	89,000,000	176,323,000	35,643,228	360,881,434	98.50%	99.98%	99.13%	186.53%	-59.52%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20,000,000	22,000,000	47,373,200	70,000,000	70,000,000	18,002,000	21,993,250	45,855,505	90.01%	99.97%	96.80%	43.27%	-57.36%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	3,650,000	4,000,000	2,000,000	1,000,000	18,002,000	21,993,250	3,993,400	#DIV/0!	602.55%	99.84%	#DIV/0!	#DIV/0!
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	159,000,000	10,000,000	312,691,000	54,846,970	18,000,000	158,321,000	9,999,978	311,032,529	99.57%	100.00%	99.47%	695.89%	-59.81%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	186,031,000	230,636,680	328,761,000	395,795,418	148,681,000	155,459,785	230,407,100	328,331,400	83.57%	99.90%	99.87%	6.12%	-56.67%
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5,470,000	9,175,200	0	0	5470000	0	0	0	0.00%	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5,470,000	9,175,200	0	0	5470000	0	0	0	0.00%	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	10,735,000	9,907,280	11,700,000	100,000,000	20,735,000	10,716,000	9,829,000	11,620,000	99.82%	99.21%	99.32%	171.46%	-59.67%
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	0	0	0	25,000,000	10,735,000	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(12)	(13)	(14)	(17)	(18)
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10,735,000	9,907,280	11,700,000	75,000,000	10,000,000	10,716,000	9,829,000	11,620,000	99.82%	99.21%	99.32%	116.19%	-59.67%
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	5,000,000	15,750,000	20,750,000	25,000,000	25,000,000	4,727,000	15,742,200	20,592,000	94.54%	99.95%	99.24%	66.81%	-58.75%
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	5,000,000	15,750,000	20,750,000	25,000,000	25,000,000	4,727,000	15,742,200	20,592,000	94.54%	99.95%	99.24%	66.81%	-58.75%
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	164,826,000	195,804,200	296,311,000	270,795,418	97,476,000	134,546,785	195,663,900	296,119,400	81.63%	99.93%	99.94%	-0.62%	-56.30%
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	164,826,000	195,804,200	296,311,000	270,795,418	97,476,000	134,546,785	195,663,900	296,119,400	81.63%	99.93%	99.94%	-0.62%	-56.30%
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	10,235,000	25,235,000	50,035,000	52,235,000	45,235,000	10,235,000	25,235,000	50,020,000	100.00%	100.00%	99.97%	58.96%	-59.99%
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0	0	47,800,000	40,000,000	43,000,000	0	0	47,790,000	#DIV/0!	#DIV/0!	99.98%	#DIV/0!	#DIV/0!
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0	0	23,200,000	25,000,000	30,000,000	0	0	23,200,000	#DIV/0!	#DIV/0!	100.00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	0	0	24,600,000	15,000,000	13,000,000	0	0	24,590,000	#DIV/0!	#DIV/0!	99.96%	#DIV/0!	#DIV/0!
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	10,235,000	25,235,000	2,235,000	12,235,000	2,235,000	10,235,000	25,235,000	2,230,000	100.00%	100.00%	99.78%	105.28%	-59.96%
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	10,235,000	25,235,000	2,235,000	12,235,000	2,235,000	10,235,000	25,235,000	2,230,000	100.00%	100.00%	99.78%	105.28%	-59.96%

Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(12)	(13)	(14)	(17)	(18)
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	90,000,000	108,060,000	119,300,000	112,800,000	121,000,000	85,439,800	107,957,000	119,273,000	94.93%	99.90%	99.98%	8.07%	-58.96%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	90,000,000	108,060,000	119,300,000	112,800,000	121,000,000	85,439,800	107,957,000	119,273,000	94.93%	99.90%	99.98%	8.07%	-58.96%
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50,000,000	50,000,000	48,000,000	54,800,000	48,000,000	45,655,000	49,897,000	47,973,000	91.31%	99.79%	99.94%	-0.56%	-58.21%
Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	40,000,000	30,000,000	53,300,000	40,000,000	55,000,000	39,784,800	30,000,000	53,300,000	99.46%	100.00%	100.00%	16.30%	-59.89%
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	0	28,060,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	0	28,060,000	18,000,000	#DIV/0!	100.00%	100.00%	#DIV/0!	#DIV/0!
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	20,735,000	85,000,000	224,001,673	210,000,000	177,735,000	19,968,000	84,681,100	223,500,000	96.30%	99.62%	99.78%	112.96%	-59.14%
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	10,735,000	40,000,000	138,295,000	50,000,000	49,735,000	10,500,000	40,000,000	138,205,000	97.81%	100.00%	99.93%	113.49%	-59.55%
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10,735,000	40,000,000	138,295,000	50,000,000	49,735,000	10,500,000	40,000,000	138,205,000	97.81%	100.00%	99.93%	113.49%	-59.55%
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dilaksanakan oleh Kecamatan bagi Pemerintah Kota yang Tidak Memiliki Desa)	10,000,000	45,000,000	85,706,673	70,000,000	88,000,000	9,468,000	44,681,100	85,295,000	94.68%	99.29%	99.52%	111.96%	-58.70%
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	5,000,000	35,000,000	47,020,673	30,000,000	48,000,000	4,727,000	34,852,000	46,940,000	94.54%	99.58%	99.83%	164.54%	-58.79%
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	5,000,000	10,000,000	28,686,000	30,000,000	30,000,000	4,741,000	9,829,000	28,355,000	94.82%	98.29%	98.85%	72.86%	-58.39%
Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	0	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	10,000,000	#DIV/0!	#DIV/0!	100.00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	0	0	0	90,000,000	40,000,000	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(12)	(13)	(14)	(17)	(18)
Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	0	0	0	10,000,000	5,000,000	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	0	0	0	25,000,000	10,000,000	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#REF!	#REF!
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	0	0	0	25,000,000	10,000,000	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	0	0	0	10,000,000	5,000,000	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	0	0	0	10,000,000	5,000,000	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#REF!	#REF!
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	0	0	0	10,000,000	5,000,000	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	34,743,000	81,540,000	90,588,000	120,248,000	90,248,000	34,742,000	81,324,800	90,503,000	100.00%	99.74%	99.91%	38.40%	-59.93%
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	34,743,000	81,540,000	90,588,000	120,248,000	90,248,000	34,742,000	81,324,800	90,503,000	100.00%	99.74%	99.91%	38.40%	-59.93%
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	0	11,540,000	10,000,000	20,000,000	10,000,000	0	11,455,000	9,985,000	#DIV/0!	99.26%	99.85%	#REF!	#REF!
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	0	18,000,000	40,340,000	50,000,000	40,000,000	0	17,870,000	40,270,000	#DIV/0!	99.28%	99.83%	#REF!	#REF!
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0	12,000,000	0	0	0	5,225,000	0	0	#DIV/0!	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	29,517,000	40,000,000	40,248,000	50,248,000	40,248,000	29,517,000	39,999,800	40,248,000	100.00%	100.00%	100.00%	10.27%	-60.00%

Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(12)	(13)	(14)	(17)	(18)
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	5,226,000	0	0	0	0	5,225,000	0	0	99.98%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Sumber: Hasil Analisis Kecamatan Arjasari, 2025

Pada tahun 2022 realisasi anggaran tercapai sebesar 84,22%. Hal ini tidak terlepas dari keselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, sehingga tercapai efisiensi anggaran sebesar 15,78%. Di tahun 2023, realisasi anggaran adalah 91,53% dan efisiensi sebesar 8,47%, sedangkan di tahun 2024 realisasi tercapai 96,77% dan efisiensi sebesar 3,23%. Dengan pelaksanaan kegiatan yang terukur, terarah dan terencana berpengaruh besar terhadap adanya efisiensi penggunaan anggaran di 3 tahun Renstra tersebut. Terjadinya perubahan anggaran dalam perencanaan dari Renstra, Renja dan DPA sangat berpengaruh terhadap pencapaian realisasi di setiap tahunnya.

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Kecamatan Arjasari

Kelompok sasaran Kecamatan adalah target utama yang akan dilayani atau dilibatkan dalam pembangunan dan kegiatan di tingkat Kecamatan, agar program yang dijalankan dapat mencapai tujuan yang efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Arjasari, maka yang menjadi kelompok sasaran layanan Kecamatan Arjasari antara lain sebagai berikut :

a. Warga Masyarakat Umum.

   Kelompok ini merupakan penerima utama layanan administrasi dasar, seperti penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, serta layanan informasi, konsultasi, dan pengaduan publik.

b. Kelompok Rentan.

   Kelompok ini mencakup lansia, penyandang disabilitas, keluarga miskin, dan korban bencana. Mereka menjadi sasaran prioritas dalam program bantuan sosial, akses layanan publik yang inklusif, serta kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

c. Pemerintah Desa.

   Sasaran layanan ini berkaitan dengan dukungan teknis dan administratif terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk pemberian rekomendasi dalam rangka pencairan keuangan desa, pembinaan kelembagaan, serta fasilitasi koordinasi

program pembangunan desa agar selaras dengan kebijakan pembangunan daerah.

2.1.5 Mitra Kecamatan Arjasari dalam Pemberian Pelayanan

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, kecamatan tidak dapat berdiri sendiri, melainkan memerlukan sinergi dengan berbagai mitra perangkat daerah (PD) sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Mitra PD berperan penting dalam mendukung pelaksanaan fungsi kecamatan, baik dalam aspek administrasi pemerintahan, pembangunan, maupun pemberdayaan masyarakat.

Secara umum, mitra PD yang terlibat dalam pemberian pelayanan di kecamatan antara lain:

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Bermitra dengan kecamatan dalam pelayanan administrasi kependudukan, seperti perekaman KTP elektronik, penerbitan kartu keluarga, akta kelahiran, akta kematian, dan dokumen kependudukan lainnya.
2. Dinas Sosial. Mendukung kecamatan dalam penyaluran bantuan sosial, verifikasi data masyarakat miskin, serta koordinasi pelaksanaan program jaring pengaman sosial di tingkat desa/kelurahan.
3. Dinas Kesehatan. Bekerja sama dalam bidang kesehatan masyarakat, misalnya penyelenggaraan posyandu, imunisasi, penanganan stunting, serta peningkatan kualitas layanan kesehatan dasar melalui puskesmas dan poskesdes.
4. Dinas Pendidikan. Bermitra dalam urusan pendidikan dasar dan program pemberdayaan masyarakat di bidang literasi, peningkatan mutu pendidikan, serta pengelolaan bantuan pendidikan bagi siswa.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Menjadi mitra utama dalam pembinaan pemerintahan desa, peningkatan kapasitas aparatur desa, penguatan kelembagaan desa, serta fasilitasi perencanaan pembangunan partisipatif.

6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Mendukung penyediaan infrastruktur dasar di wilayah kecamatan, seperti perbaikan jalan lingkungan, saluran irigasi, serta sarana dan prasarana pelayanan publik.
7. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Bermitra dalam menjaga ketertiban umum, penegakan peraturan daerah, serta perlindungan masyarakat di tingkat kecamatan.
8. Jajaran Samping (Forkopimcam dan Instansi Vertikal di Kecamatan). Jajaran samping yang terdiri dari Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) serta instansi vertikal di wilayah Kecamatan Arjasari, memiliki peran penting dalam memperkuat fungsi koordinasi dan integrasi pelayanan publik. Forkopimcam yang terdiri dari unsur kepolisian, TNI dan pihak kecamatan, berkolaborasi dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban wilayah. Selain itu, instansi vertikal seperti Kantor Urusan Agama (KUA) berperan dalam pelayanan pencatatan nikah dan urusan keagamaan, sementara Unit Pelaksana Teknis (UPT) dinas mendukung layanan teknis sesuai bidangnya. Sinergi dengan jajaran samping memastikan pelayanan publik di Kecamatan Arjasari dapat berjalan secara terpadu, merata, dan mendukung ketertiban serta kesejahteraan masyarakat.
9. Lembaga Pendidikan dan Keagamaan. Lembaga pendidikan, baik formal maupun nonformal, menjadi mitra yang berkontribusi dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul. Sekolah dan madrasah berperan dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan daya saing generasi muda Arjasari. Di sisi lain, lembaga keagamaan seperti pesantren, majelis taklim, dan rumah ibadah turut membentuk moral, karakter, serta akhlak masyarakat. Kolaborasi ini tidak hanya meningkatkan kualitas Pendidikan, tetapi juga memperkuat nilai religius dan sosial masyarakat.
10. Organisasi Kemasyarakatan dan Forum Partisipasi Warga. Organisasi kemasyarakatan seperti PKK, karang taruna, LPM,

serta forum partisipasi warga lainnya merupakan mitra penting Kecamatan Arjasari dalam pembangunan.

Melalui kolaborasi dengan mitra PD tersebut, kecamatan mampu meningkatkan efektivitas pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Sinergi ini juga memperkuat fungsi kecamatan sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat di tingkat wilayah.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Arjasari

2.2.1 Penelaahan RPJMN 2025-2029

Dalam menghadapi tantangan global dan domestik yang semakin kompleks, pemerintah Indonesia menetapkan sejumlah isu prioritas dalam RPJMN 2025-2029. Isu-isu ini disusun untuk memastikan pembangunan nasional berjalan secara berkelanjutan dan mampu mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Berbagai sektor strategis, seperti sosial, ekonomi, tata kelola pemerintahan, supremasi hukum, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi, menjadi fokus utama dalam perencanaan ini. Setiap isu prioritas dirancang untuk memberikan solusi terhadap permasalahan fundamental yang masih menghambat pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, wilayah Pulau Jawa masih menghadapi berbagai tantangan yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai pusat ekonomi nasional, Pulau Jawa memiliki beban yang kompleks, mulai dari inefisiensi perkotaan, rendahnya adopsi teknologi dalam industri, hingga ketimpangan infrastruktur dan kerentanan terhadap bencana. Selain itu, permasalahan sosial seperti *mismatch* keterampilan dengan kebutuhan industri, tingginya angka kemiskinan, serta persoalan kesehatan masyarakat seperti stunting dan TBC juga menjadi isu yang harus segera ditangani. Untuk itu, identifikasi isu prioritas dan strategis menjadi langkah penting dalam perumusan kebijakan yang efektif guna memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Kawasan perkotaan dan metropolitan menghadapi inefisiensi dalam melayani kota itu sendiri dan daerah sekitamya. Rendahnya penggunaan teknologi tinggi dalam industri yang membuat nilai tambah industri masih rendah. Infrastruktur logistik belum sepenuhnya terintegrasi, terutama antarkawasan, serta terdapat kesenjangan ketersediaan infrastruktur fisik dan sosial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, terutama di Jawa bagian selatan.

Masih tingginya kerentanan dan potensi bencana seperti gempa bumi dan tsunami di daerah pesisir selatan Jawa, tanah longsor dan letusan gunung api, banjir rob dan penurunan muka tanah di daerah pesisir utara Jawa. Kesenjangan keterampilan dan *mismatch* pendidikan dengan kebutuhan industri. Prevalensi *stunting, wasting*, dan *underweigh*t masih relatif tinggi. Beban kasus TBC tertinggi ada pada wilayah padat penduduk dan tingkat kemiskinan rata-rata Jawa masih cenderung tinggi.

Isu-isu strategis yang dihadapi Pulau Jawa dalam RPJMN 2025– 2029 tidak terlepas dari kondisi yang terjadi di wilayah-wilayah tertentu, termasuk Kabupaten Bandung. Sebagai bagian dari wilayah Bandung Raya, Kabupaten Bandung menghadapi tantangan serupa dengan skala yang lebih spesifik sesuai karakteristik wilayahnya. Beberapa permasalahan utama yang dihadapi Pulau Jawa, seperti inefisiensi perkotaan, rendahnya adopsi teknologi industri, kesenjangan infrastruktur, serta ketimpangan akses pendidikan dan kesehatan, juga ditemukan di Kabupaten Bandung, meskipun dengan akar masalah yang lebih kontekstual. Dalam konteks Kabupaten Bandung, tantangan pembangunan utama terkait dengan:

- Belum optimalnya hilirisasi dan diversifikasi industri berbasis sumber daya alam
- Pengembangan pusat pertumbuhan yang belum efisien
- Rendahnya produktivitas masyarakat akibat keterbatasan konektivitas, akses pendidikan, dan layanan kesehatan.

Kecamatan Arjasari, sebagai bagian integral dari Kabupaten Bandung, turut merasakan dampak dari isu-isu strategis yang dihadapi Pulau Jawa dalam RPJMN 2025-2029. Beberapa permasalahan utama yang menjadi perhatian di tingkat kecamatan ini meliputi belum optimalnya hilirisasi

dan diversifikasi industri berbasis sumber daya alam, pengembangan pusat pertumbuhan yang belum efisien, serta rendahnya produktivitas masyarakat akibat keterbatasan konektivitas, akses pendidikan, dan layanan kesehatan. Secara spesifik, permasalahan ini termanifestasi dalam bentuk:

- Arjasari memiliki potensi sumber daya alam yang signifikan, namun pemanfaatannya belum dioptimalkan untuk meningkatkan nilai tambah produk industri lokal. Hilirisasi yang terbatas menyebabkan ketergantungan pada penjualan bahan mentah, yang berakibat pada rendahnya pendapatan dan terbatasnya lapangan kerja berkualitas bagi masyarakat setempat.
- Sebagai bagian dari Kabupaten Bandung, Arjasari diharapkan dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang mampu menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja. Namun pengembangan pusat pertumbuhan di Kecamatan Arjasari belum efisien, ditandai dengan kurangnya infrastruktur pendukung, regulasi yang menghambat investasi, serta koordinasi yang kurang optimal antar pemangku kepentingan.
- Rendahnya produktivitas masyarakat akibat keterbatasan konektivitas, baik fisik maupun digital, menghambat akses masyarakat Arjasari terhadap informasi, pasar, dan layanan publik. Selain itu, akses terhadap Pendidikan juga masih terbatas, yang berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia dan produktivitas masyarakat secara keseluruhan

Dengan mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis ini, Kecamatan Arjasari dapat merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

2.2.2 Penelaahan RPJMD Kabupaten Bandung 2025-2029

RPJMD Kabupaten Bandung 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan strategis yang akan menjadi pedoman bagi pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Dokumen ini disusun sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program kerja Bupati Bandung terpilih,

serta diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2025-2029. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi kepala daerah terpilih, maka diperlukan perumusan yang tepat terkait analisis permasalahan pembangunan daerah.

Perumusan permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan tahapan yang penting karena berpengaruh langsung terhadap visi, misi, tujuan, dan sasaran yang ditetapkan pada tahapan selanjutnya. Untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah terpilih, maka diperlukan perumusan yang tepat terkait analisis permasalahan pembangunan daerah. Berdasarkan kondisi Kabupaten Bandung beberapa tahun terakhir, maka permasalahan pembangunan utama di Kabupaten Bandung yang berkaitan dengan misi 3 “Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel” yaitu:

1.Tantangan Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan

Tabel 2.15 Tantangan Pembangunan Tata Kelola Pemerintah

Urutan Prioritas	Tantangan Pembangunan Tata Kelola Pemerintah
1	Reformasi birokrasi yang masih butuh peningkatan dalam rangka menghadapi dynamic government
2	Implementasi SPBE yang belum sepenuhnya stabil, dengan masih adanya tantangan dalam integrasi sistem digital pemerintahan
3	Kualitas pelayanan publik yang masih perlu ditingkatkan, baik dari segi transparansi, akuntabilitas, maupun partisipasi masyarakat

Sumber: RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029

Dalam aspek tata kelola pemerintahan, Kabupaten Bandung masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu segera diatasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Salah satu tantangan utama adalah kualitas pelayanan publik yang masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Selain itu, reformasi birokrasi juga menjadi perhatian karena masih diperlukan peningkatan dalam menghadapi perubahan dinamika pemerintahan yang semakin kompleks di era digital. Salah satu langkah penting untuk mengatasi tantangan ini adalah mempercepat implementasi Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang masih menghadapi kendala dalam integrasi sistem digital. Dengan meningkatkan stabilitas dan koordinasi dalam sistem digital pemerintahan, diharapkan pelayanan publik dapat lebih mudah diakses, responsif, serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara cepat dan transparan.

2.2.3 Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung

Sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2036 dijelaskan bahwa Penataan Ruang Kabupaten Bandung adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten di wilayah yang menjadi kewenangan Kabupaten, dalam rangka optimalisasi dan mensinergikan pemanfaatan sumberdaya daerah.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Perangkat Daerah. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang *eksisting*, maka Perangkat Daerah dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan dan prioritas wilayah pelayanan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Perangkat Daerah dapat menyusun Rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2024-2044, pada Bab V diamanatkan rencana tata ruang wilayah PKL, PKLp dan PPK. Sesuai arahan RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2024-2044.

Berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang berkaitan dengan wilayah Kecamatan Arjasari adalah sebagai berikut :

1. Wilayah Kecamatan Arjasari terletak di sebelah timur ibu kota Kabupaten Bandung (Soreang);

2. Kecamatan Arjasari termasuk dalam Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL);
3. Kecamatan Arjasari termasuk kawasan hutan lindung, kawasan suaka alam, taman wisata alam, kawasan hutan produksi tetap, kawasan tanaman pangan, kawasan holtikultura, dan kawasan perkebunan;
4. Kecamatan Arjasari memiliki fungsi sebagai kawasan industri, kawasan pariwisata, pusat perdagangan dan jasa skala lingkungan, pusat permukiman perkotaan dan perdesaan, pusat wisata alam dan budaya, pusat konservatif kehutanan, sentra pertanian dan perkebunan, rencana pengembangan kawasan ternak besar, ternak kecil, pengembangan kawasan perikanan budidaya pembesaran ikan, dan pembenihan ikan.

2.2.4Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan integrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS berperan dalam menilai dampak kebijakan sejak tahap perencanaan agar tidak merusak ekosistem dan kesejahteraan masyarakat.

Bapperida Kabupaten Bandung telah melakukan kajian mengenai isu-isu yang akan menjadi dasar dalam penyusunan strategi pembangunan berkelanjutan yang lebih terarah dan efektif. Muatan KLHS RPJMD tahun 2025-2029 terfokus pada 3 isu PB strategi dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 2.16 Isu Strategis KLHS RPJMD Kabupaten Bandung

No	Isu PB Prioritas Berdasarkan 203 Indikator	TPB yang mendukung Isu PB
1	Rendahnya kualitas SDM (sumber daya manusia) mengakibatkan rendahnya kualitas hidup Masyarakat	TPB 4: Pendidikan bermutu Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua

No	Isu PB Prioritas Berdasarkan 203 Indikator	TPB yang mendukung Isu PB
		TPB 16: Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan
2	Belum optimalnya tata kelola pemerintah akibat kurangnya keselarasan program antar OPD	TPB 16: Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan
		TPB 1: Tanpa Kemiskinan Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk apapun
3	Belum optimalnya penanganan tanggap darurat bencana	TPB 1: Tanpa Kemiskinan Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk apapun

Sumber: KLHS RPJMD, 2025

Sebagai wilayah administratif yang terus mengalami perkembangan, Kecamatan Arjasari memiliki peran strategis dalam mendukung penyelesaian isu-isu pembangunan secara berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, Kecamatan Arjasari berkomitmen untuk mendorong pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SDGs) melalui pendekatan kolaboratif bersama Pemerintah Kabupaten, pemerintah desa, serta partisipasi aktif masyarakat.

Upaya ini diwujudkan melalui perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan yang selaras dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan secara terpadu. Dengan demikian, pembangunan di wilayah Kecamatan Arjasari diharapkan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan sumber daya, keadilan sosial, serta ketahanan wilayah dalam jangka panjang.

2.2.5 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Arjasari

Permasalahan merupakan suatu kondisi atau situasi yang dianggap tidak memuaskan atau mengganggu, yang memerlukan solusi atau tindakan untuk diselesaikan. Permasalahan dapat merujuk pada ketidaksempurnaan atau ketidakpuasan terhadap kondisi yang ada, baik berupa kebutuhan yang belum terpenuhi, tantangan yang dihadapi, atau masalah yang perlu diselesaikan. Permasalahan dapat muncul karena adanya kesenjangan antara harapan atau tujuan yang ingin dicapai dengan realitas yang ada.

Tugas, pokok dan fungsi kecamatan dalam memberikan pelayanan, senantiasa mampu menyesuaikan dengan lingkungan internal maupun eksternal, dan aspiratif bagi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian pelayanan kepada masyarakat merupakan bagian dari pelayanan kecamatan yang tidak boleh diabaikan.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi kecamatan, yaitu pelayanan kepada masyarakat baik berkaitan dengan pelayanan, tugas umum pemerintahan dan tata kelola pemerintahan yang baik, masih terdapat permasalahan-permasalahan yang teridentifikasi, yaitu:

1. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja di tingkat Kecamatan Arjasari.
2. Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya kecamatan.
3. Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat.
4. Belum optimalnya capaian kinerja kecamatan dalam pelaksanaan pelimpahan kewenangan bupati.
5. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan desa.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas, apabila tidak diantisipasi dengan faktor kekuatan yang ada di kecamatan, akan menimbulkan dampak kepada masyarakat, dan harus dilakukan tindakan yang nyata.

Tabel 2.17
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan	Belum optimalnya akuntabilitas kinerja di tingkat Kecamatan Arjasari	Kapasitas aparatur kecamatan dalam memahami konsep manajemen kinerja masih terbatas, serta budaya kerja aparatur masih berorientasi pada pelaksanaan kegiatan, bukan pada hasil
2	Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya manusia di kecamatan.	Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang belum memadai	Jumlah aparatur yang terbatas, serta kompetensi teknis dan manajerial yang belum merata
3	Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat.	Kualitas pelayanan publik yang masih perlu ditingkatkan	Sarana dan prasarana pelayanan yang masih terbatas, serta belum optimalnya penerapan standar operasional prosedur
4	Belum optimalnya capaian kinerja kecamatan dalam pelaksanaan pelimpahan kewenangan bupati.	Masih belum jelasnya peraturan tentang pelimpahan kewenangan	Pelimpahan kewenangan kepada camat tidak sepenuhnya didukung oleh pembinaan dari dinas teknis.
5	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan desa	Masih kurangnya pemahaman terhadap tata Kelola pemerintahan desa Masih kurangnya pembinaan dari pemerintahan di atasnya	Masih lemahnya pemahaman tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya dalam melaksanakan tugas pokoknya.

Sumber: Hasil Analisis Kecamatan Arjasari, 2025

2.2.6 Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah, karena dampaknya yang signifikan bagi daerah sesuai dengan urgensi, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang.

Penentuan isu strategis dalam Renstra Kecamatan Arjasari tahun 2025-2029 dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang mempengaruhi pembangunan. Proses ini mencakup analisis terhadap faktor internal dan eksternal yang berpotensi mempengaruhi arah kebijakan dan program pembangunan. Faktor internal meliputi potensi dan permasalahan pada bidang sosial, ekonomi, infrastruktur, serta tata kelola pemerintahan, sedangkan faktor eksternal mencakup kebijakan nasional, dinamika global, serta perkembangan sosial dan ekonomi di tingkat regional. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek, isu strategis

yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat dalam penyusunan program pembangunan.

Analisis isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dalam melaksanakan fugas pokok dan fungsi kecamatan. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan pencapaian pelayanan kepada masyarakat.

Kecamatan Arjasari sebagai instansi sektor publik telah mengupayakan penyusunan Renstra yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu 2025-2029 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Renstra Kecamatan Arjasari dalam penyusunannya melibatkan seluruh komponen di kecamatan yang telah menempatkan Renstra sebagai komitmen bersama dalam mewujudkan kinerja aparatur Kecamatan Arjasari yang akomodatif terhadap tuntutan masyarakat atas pelayanan yang cepat, mudah, murah dan transparan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2025-2029, terdapat isu strategis yang meliputi tujuh kelompok besar isu yang didalamnya mencakup permasalahan-permasalahan terkait dengan bidang sosial, ekonomi, infrastruktur, serta tata kelola pemerintahan yaitu:

1) Pengelolaan tata ruang dan lingkungan berkelanjutan serta ketahanan terhadap bencana.
2) Pemerataan kualitas pendidikan dan kesehatan serta peningkatan daya saing sumber daya manusia.
3) Penguatan ekonomi inklusif dan pengurangan kemiskinan.
4) Peningkatan ketahanan pangan daerah.
5) Peningkatan infrastruktur dasar dan pengembangan wilayah.
6) Transformasi tata kelola pemerintahan.

7) Penguatan ketahanan sosial serta peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Isu strategis sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung mengacu pada isu strategis RPJMD Kabupaten Bandung yang ke 6 yaitu: “Transformasi Tata Kelola Pemerintahan”. Transformasi tata Kelola pemerintahan yang lebih efektif dan transparan akan meningkatkan kepercayaan publik serta mendorong efisiensi dalam pelayanan publik. Berdasarkan hal tersebut, telah ditentukan isu strategis Kecamatan Arjasari. Isu strategis Kecamatan Arjasari dapat dilihat pada tabel 2.18.

Tabel 2.18 Perumusan Isu Strategis Kecamatan Arjasari

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
Pelayanan Publik Tingkat Dasar	Belum optimalnya akuntabilitas kinerja di tingkat Kecamatan Arjasari	Sinkronisasi program antar OPD belum baik	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan akibat kurangnya keselarasan program antar OPD	Desentralisasi dan otonomi daerah	Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja kecamatan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang belum memadai	Rendahnya kualitas SDM (Sumber Daya Manusia)	Transformasi Digital	Bonus demografi	Kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM)	Optimalisasi kualitas, dan kuantitas Sumber Daya Manusia aparatur untuk mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kualitas pelayanan publik yang masih perlu ditingkatkan	Belum optimalnya tata Kelola pemerintahan	Transformasi Digital	Desentralisasi dan otonomi daerah	Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Peningkatan mutu dan konsistensi pelayanan public yang cepat, mudah dan akuntabel
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Belum optimalnya capaian kinerja kecamatan dalam pelaksanaan pelimpahan kewenangan bupati.	Sinkronisasi program antar OPD belum baik	Transformasi Digital	Desentralisasi dan otonomi daerah	Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Optimalisasi kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur untuk mendukung pelaksanaan pelimpahan kewenangan secara efektif dan efisien
Pelayanan Publik Tingkat Dasar	Belum optimalnya tata Kelola pemerintahan desa	Belum optimalnya tata Kelola pemerintahan	Transformasi Digital	Desentralisasi dan otonomi daerah	Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Optimalisasi kualitas, dan kuantitas Sumber Daya Manusia perangkat desa untuk mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Arjasari, 2025

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029

Tujuan dan sasaran pembangunan Kecamatan Arjasari merupakan arah yang hendak dicapai dalam periode perencanaan lima tahunan, yang disusun secara selaras dengan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029. Perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Arjasari didasarkan pada analisis kondisi wilayah, potensi yang dimiliki, permasalahan aktual yang dihadapi, serta hasil evaluasi pelaksanaan Renstra periode sebelumnya.

Penelaahan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 bukan hanya untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Bandung, tetapi juga untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan, permasalahan, serta potensi daerah yang terdapat di Kecamatan Arjasari.

3.1.1 Tujuan

Untuk mengantisipasi tantangan dan perkembangan ke depan, Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung yang merupakan salah satu Satuan Kerja pemerintah Daerah Kabupaten Bandung perlu terus menerus mengembangkan peluang dan melakukan perubahan ke arah perbaikan seiring dengan meningkatnya persaingan, tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima, transparan yang demokratis sehingga mendorong lembaga ini untuk senantiasa mempersiapkan diri agar tetap eksis dalam proses pembangunan. Perubahan tersebut perlu dilakukan secara bertahap, terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabililtas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan manfaat masyarakat pada khususnya.

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah.

Renstra Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung Tahun 2025 – 2029 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029. Visi Kabupaten Bandung yang tercantum dalam RPJMD 2025-2029 yaitu “Terwujudnya Kabupaten Bandung yang Lebih Bangkit, Edukatif,

Dinamis, Agamis, Sejahtera (Bedas) Maju, dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas“. Visi tersebut dijabarkan ke dalam 5 (Lima) Misi Pembangunan yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul, Kompetitif dan Berahlak Serta Penguatan Kesetaraan Gender Melalui Pemberdayaan Perempuan dan Mendorong Perlindungan bagi anak;
2. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Mendorong Ketahanan Pangan Melalui Produksi Pangan Lokal yang Berkelanjutan;
3. Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan pelayanan publik yang Partisipatis, Transparan dan Akuntabel;
4. Meningkatkan Kualitas Infrastuktur yang terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan;
5. Menjaga Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Agar visi dan misi tersebut dapat diwujudkan, maka Kecamatan Arjasari menetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan berdasarkan pada sasaran yang ingin dicapai dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029. Kecamatan Arjasari berpedoman pada Misi Ke 3 yaitu “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Tranparan dan Akuntabel”. Dengan tujuan RPJMD Misi Ke 3 yaitu “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan Kecamatan Arjasari untuk mencapai sasaran dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029, yaitu: “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”, dengan indikator “Laju Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)”.

3.1.2 Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis Perangkat Daerah dan permasalahan Perangkat Daerah. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Sasaran pembangunan Kecamatan Arjasari tahun 2025-2029 difokuskan pada peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kecamatan. Sasaran ini menjadi landasan utama dalam mendorong transformasi layanan publik yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat serta mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih, efektif dan melayani.

Sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Arjasari, yaitu: “Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan”, dengan indikator “Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)”.

Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Kecamatan Arjasari pada periode tahun 2025-2029, secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Arjasari

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang Lebih Transparan, Akuntabel, Efektif, dan Efisien	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Laju Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	0.19%	0.22%	0.24%	0.25%	0.26%	0.27%	Persentase dari selisih nilai IKM di kecamatan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, dibandingkan dengan nilai IKM tahun sebelumnya.
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90.02 Poin	90,22 Poin	90,44 Poin	90,67 poin	90,91 poin	91,16 Poin	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat sesuai PermenPAN R) Nomor 14 Tahun 2017

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Arjasari, 2025

3.2 Strategi Kecamatan Arjasari Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Arjasari Tahun 2025-2029

Strategi adalah suatu perencanaan jangka panjang yang disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Strategi pencapaian tujuan dan sasaran strategis merupakan rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan program dan kegiatan dengan mempertimbangkan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi dan akan dilakukan setiap tahunnya. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi atau cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analistis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program oleh PD yang bersangkutan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra, Kecamatan Arjasari merancang penahapan pembangunan secara sistematis setiap tahunnya selama periode 2026 hingga 2030. Penahapan ini disusun sebagai langkah operasional dan evaluatif guna memastikan ketercapaian indikator kinerja Perangkat Daerah secara berkelanjutan.

Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penahapan Renstra PD disajikan seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2 Penahapan Renstra Kecamatan Arjasari

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan SDM aparatur kecamatan, sarana dan prasarana serta mekanisme pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat	Peningkatan SDM aparatur kecamatan, sarana dan prasarana pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat serta membangun pelayanan berbasis digital	Peningkatan pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat melalui peningkatan pelayanan berbasis digital	Peningkatan pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat melalui penerapan pelayanan berbasis digital	Peningkatan pelayanan publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat yang berkelanjutan
Peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan melalui pemetaan permasalahan dan potensi lokal	Peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan dengan mendorong inovasi berdasarkan hasil pemetaan	Peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan berbasis potensi lokal melalui peningkatan inovasi dan	Penguatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan berbasis potensi lokal melalui peningkatan inovasi dan	Penguatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan berbasis potensi lokal melalui peningkatan inovasi dan kolaborasi lintas

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	permasalahan dan potensi lokal	kolaborasi lintas sektor	kolaborasi lintas sektor	sektor yang berkelanjutan

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Arjasari , 2025

Tahap I – Tahun 2026:

Tahun 2026 merupakan tahap pertama atau fase awal yang menitikberatkan pada penguatan fondasi. Fokus diarahkan pada peningkatan kapasitas SDM aparatur kecamatan, penyediaan sarana dan prasarana, serta penyusunan mekanisme pelayanan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan kepuasan masyarakat. Selain itu, pada tahap ini juga dilakukan pemetaan kondisi, permasalahan dan potensi desa yang menjadi basis data untuk peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat di tahun-tahun berikutnya. Dengan adanya pondasi yang kuat pada tahap awal ini, diharapkan Kecamatan Arjasari mampu membangun sistem pelayanan yang efektif sekaligus menyiapkan dasar strategi pemberdayaan masyarakat yang terarah, berkelanjutan, dan sesuai dengan potensi lokal yang dimiliki.

Tahap II – Tahun 2027:

Pada tahap kedua, peningkatan kapasitas SDM aparatur kecamatan serta penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik terus dilanjutkan sebagai tindak lanjut dari penguatan pondasi di tahap awal. Upaya ini diiringi dengan langkah strategis membangun sistem pelayanan berbasis digital secara bertahap, sehingga pelayanan publik mulai bertransformasi menuju model yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Sementara itu, pemberdayaan masyarakat, fokus diarahkan untuk mendorong munculnya inovasi lokal yang didasarkan pada hasil pemetaan potensi dan permasalahan desa yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya, sehingga masyarakat mampu berperan aktif dalam pembangunan wilayahnya. Dengan demikan, tahap ini menjadi titik awal menuju pelayanan berbasis digital dan masyarakat desa yang lebih berdaya dan inovatif.

Tahap III – Tahun 2028:

Memasuki tahap ketiga, menjadi fase transformasi dimana fokus pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang semakin berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat

melalui peningkatan pelayanan berbasis digital secara lebih luas. Aparatur kecamatan dituntut untuk mampu beradaptasi dengan transformasi digital, sehingga pelayanan dapat berlangsung lebih cepat, transparan, akuntabel, serta mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Di sisi lain, pemberdayaan masyarakat diarahkan pada pengembangan potensi lokal yang lebih produktif melalui inovasi yang berkelanjutan serta penguatan kolaborasi lintas sektor, baik dengan instansi pemerintah, dunia usaha, maupun komunitas masyarakat. Dengan demikian, tahap ketiga diharapkan terjadi percepatan dalam pencapaian pelayanan publik yang lebih berkualitas dan berorientasi digital, serta mendorong terwujudnya masyarakat desa yang semakin berdaya, kreatif, dan memiliki keunggulan kompetitif melalui inovasi dan pengembangan potensi lokal secara berkelanjutan.

Tahap IV – Tahun 2029:

Tahap keempat merupakan fase pematangan, dimana fokus diarahkan pada penguatan implementasi pelayanan publik berbasis digital yang telah berjalan pada tahap sebelumnya. Pada fase ini, pelayanan tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara cepat, mudah, dan transparan, tetapi juga memastikan keberlanjutan serta peningkatan kualitas layanan yang semakin konsisten dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal semakin diperkokoh melalui inovasi dan kolaborasi yang semakin erat, sehingga mampu memberikan dampak sosial-ekonomi yang signifikan. Dengan demikian, tahap ini bukan hanya memperkuat kualitas layanan publik, tetapi juga mendorong lahirnya kemandirian dan keberdayaan masyarakat secara lebih berkelanjutan.

Tahap V – Tahun 2030:

Tahun 2030 merupakan tahap akhir dari periode Renstra Kecamatan Arjasari Tahun 2025-2029, dimana tahap ini menjadi fase keberlanjutan. Pada tahap ini, pelayanan publik digital diproyeksikan sudah berjalan secara utuh, konsisten dan berkesinambungan untuk memastikan kualitas layanan tetap terjaga dan mampu menjawab dinamika kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, dengan kepuasan masyarakat sebagai indikator utama keberhasilan. Upaya peningkatan kapasitas aparatur, penyediaan sarana prasarana, dan

inovasi pelayanan dikembangkan menjadi sistem yang berkelanjutan. Sementara itu, pemberdayaan masyarakat diarahkan pada penguatan inovasi dan kolaborasi lintas sektor yang berorientasi pada kemandirian, keberlanjutan, serta peningkatan daya saing wilayah. Tahap ini menjadi puncak dari seluruh proses perencanaan dan pelaksanaan yang dilalui selama lima tahun, sekaligus pintu gerbang untuk melanjutkan pembangunan.

3.3 Arah Kebijakan Kecamatan Arjasari dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Arjasari Tahun 2025-2029

Kebijakan adalah langkah yang diambil oleh Perangkat Daerah dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan.

Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Arjasari Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan oprasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Arjasari dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Arjasari.

Kebijakan Kecamatan Arjasari memiliki arah kebijakan sebagai berikut yaitu: “Peningkatan Pelayanan Publik yang Responsif, Adaptif, Transparan, Akuntabel dan Berbasis Digital Berorientasi Pada Kepuasan Masyarakat Serta Pemberdayaan Masyarakat di Desa/Kelurahan”, yang disajikan pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Arjasari

No	Sasaran RPJMD yang Relevan	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang Lebih Transparan, Akuntabel, Efektif, dan Efisien	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di desa/kelurahan berbasis potensi lokal	Peningkatan pelayanan publik yang responsif, adaptif, transparan, akuntabel dan berbasis digital berorientasi pada kepuasan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat di desa/kelurahan	

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Arjasari, 2025

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif

Renstra Kecamatan Arjasari tahun 2025-2029 didasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutkahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, membutuhkan kerangka sistematis yang berisi indikasi rencana program prioritas berikut kegiatan-kegiatan yang mendesak untuk dilakukan. Oleh karena itu perlu disusun indikasi rencana program prioritas dan prakiraan dana yang dibutuhkan untuk mewujudkan program tersebut selama lima tahun ke depan.

Sesuai dengan visi dan misi, strategi dan kebijakan sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, maka Kecamatan Arjasari mempunyai 6 (enam) program, diantaranya sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelanggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Untuk lebih jelasnya dalam merumuskan program/ kegiatan/ Subkegiatan Renstra PD dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Renstra Kecamatan Arjasari

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang Lebih Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				Laju Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Persentase dari selisih nilai IKM di kecamatan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, dibandingkan dengan nilai IKM tahun sebelumnya.
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Hasil Survey Kepuasan Masyarakat sesuai PermenPAN R) Nomor 14 Tahun 2017
			Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Indeks Manajemen Resiko Perangkat Daerah		-Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah -Indeks Manajemen Resiko Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-Hasil penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat pemerintah daerah oleh Tim Evaluator Indeks Reformasi Birokrasi -Hasil penilaian evaluasi Manajemen Resiko oleh Inspektorat
				Terlaksananya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil penilaian evaluasi AKIP oleh Inspektorat
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Tersedianya Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
				Tersedianya Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
				Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Terselenggaranya Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
				Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai SAP	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	(Jumlah Dokumen Administrasi keuangan yang telah disusun sesuai ketentuan / Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang harus disusun) x100%
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				Terlaksananya Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD
				Terlaksananya Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang tepat waktu	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu	persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	(Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang telah disusun sesuai ketentuan / Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang harus disusun) x100%
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
				Terlaksanaya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
				Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
				Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	Administrasi Umum Perangkat Daerah	(Jumlah Dokumen Administrasi Umum yang telah disusun sesuai ketentuan / Jumlah Dokumen Administrasi Umum yang harus disusun) x100%
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
				Tersedianya Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD yang telah disusun / Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD yang harus disusun) x100%
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
				Terlaksananya Administrasi BMD	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	(jumlah administrasi BMD yang terkelola dengan baik/jumlah administrasi BMD)
				Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah yang terpenuhi / Jumlah Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah yang harus dipenuhi x 100%
				Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan
				Terlaksananya Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
				Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aset Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik / Jumlah Aset Barang Milik Daerah x 100%
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
				Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi
				Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi
			Meningkatnya kapasitas kelembagaan kecamatan dalam mengelola urusan pemerintahan umum sebagai perpanjangan tangan Kepala Daerah		Persentase Pelasanaan Pelimpahan Kewenangan Urusan Pemerintahan Umum dari Kepala Daerah Kepada Camat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan umum dari Kepala Daerah kepada Camat

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
				Terselenggaranya koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang dilaksanakan / koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
				Terselenggaranya kegiatan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja lain di kecamatan	Persentase pelaksanaan urusan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja lain	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja lain di kecamatan / jumlah kegiatan yang direncanakan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja lain di kecamatan x 100%
				Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
				Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
				Terselenggaranya koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum yang terlaksana / jumlah koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
				Terselenggaranya urusan pelimpahan kepada camat	Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana / Jumlah Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
			Meningkatnya efektivitas koordinasi dalam penegakan Peraturan Daerah guna mewujudkan kondisi masyarakat yang tentram dan tertib		Persentase koordinasi penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah koordinasi penegakkan perda yang berkaitan dengan Trantibum di Kecamatan / Jumlah koordinasi penegakkan perda yang direncanakan berkaitan dengan Trantibum di Kecamatan x 100%
				Terselenggaranya koordinasi dan pembinaan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Koordinasi dan Pembinaan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koodinasi dan Pembinaan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana / Jumlah Koodinasi dan Pembinaan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
				Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
				Terselenggaranya koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang dilaksanakan / Jumlah koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang direncanakan x 100%
				Terselenggaranya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
			Meningkatnya efektivitas koordinasi kecamatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kerja kecamatan		Persentase koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan / Jumlah koordinasi urusan pemerintahan umum yang direncanakan x 100%
				Terselenggaranya kegiatan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
							/ Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
				Terlaksananya Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
				Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
				Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional
				Terlaksananya Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
			Meningkatnya kapasitas dan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat		Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang dibina	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang dibina / Jumlah Keseluruhan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan x 100%
				Terselenggaranya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang terlaksana / Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang direncanakan x 100%

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
				Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
				Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
				Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Terfasilitasi dan Dibina / Jumlah fasilitasi dan pembinaan Lembaga kemasyarakatan yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya
				Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
				Terlaksananya Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
				Terselenggaranya fasilitasi dan pembinaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	Persentase fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang dilaksanakan / Jumlah fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
				Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
				Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
				Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya
				Terlaksananyua Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
				Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga
			Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa melalui pembinaan, *monitoring*, dan evaluasi yang berkesinambungan di wilayah kecamatan		Persentase pembinaan *monitoring* dan evaluasi pemerintahan desa	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah pelaksanaan pembinaan dan monev pada pemerintahan desa / Jumlah perencanaan pembinaan dan monev pada pemerintahan desa
				Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan desa	Persentase Desa yang dibina dan diawasi	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang dibina dan diawasi / Total jumlah desa x 100%
				Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa
				Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
				Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
				Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
				Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
				Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
				Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan

Sumber: Hasil Analisis Kecamatan Arjasari, 2025

Tabel 4.2 Rencana Program/ Kegiatan/ Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket
		BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										
		2024		2026		2027		2028		2029		2030		
		Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	-		61 poin		63,5 poin		66 poin		68,5 poin		71 poin		S.3.1
	Indeks Manajemen Resiko Perangkat Daerah	36,42 poin	4.945.182.841	37 poin	4.840.831.900	38 poin	4.752.988.000	39 poin	4.752.988.000	40 poin	4.752.988.000	41 poin	4.752.988.000	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	100%	39.381.841	77 poin	50.000.000	77,5 poin	40.000.000	78 poin	40.000.000	78,5 poin	40.000.000	79 poin	40.000.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	9.381.841	2 Dokumen	20.000.000	2 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	10.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	5.000.000	2 dokumen	5.000.000	2 dokumen	5.000.000	2 dokumen	5.000.000	2 dokumen	5.000.000	2 dokumen	5.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	5.000.000	2 dokumen	5.000.000	2 dokumen	5.000.000	2 dokumen	5.000.000	2 dokumen	5.000.000	2 dokumen	5.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	20.000.000	5 Laporan	18.000.000	5 Laporan	18.000.000	5 Laporan	18.000.000	5 Laporan	18.000.000	5 Laporan	18.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket
		BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										
		2024		2026		2027		2028		2029		2030		
		Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 dokumen	-	1 dokumen	1.000.000	1 dokumen	1.000.000	1 dokumen	1.000.000	1 dokumen	1.000.000	1 dokumen	1.000.000	
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 data	-	1 data	1.000.000	1 data	1.000.000	1 data	1.000.000	1 data	1.000.000	1 data	1.000.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	100%	3.928.267.800	100%	4.171.528.000	100%	4.171.528.000	100%	4.171.528.000	100%	4.171.528.000	100%	4.171.528.000	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	216 Orang/bulan	3.924.267.800	216 Orang/bulan	4.167.528.000	216 Orang/bulan	4.167.528.000	216 Orang/bulan	4.167.528.000	216 Orang/bulan	4.167.528.000	216 Orang/bulan	4.167.528.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	2.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 Laporan	2.000.000	4 Laporan	2.000.000	4 Laporan	2.000.000	4 Laporan	2.000.000	4 Laporan	2.000.000	4 Laporan	2.000.000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD	100%	-	100%	1.000.000	100%	1.000.000	100%	1.000.000	100%	1.000.000	100%	1.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket
		BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										
		2024		2026		2027		2028		2029		2030		
		Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	-	1 Laporan	1.000.000	1 Laporan	1.000.000	1 Laporan	1.000.000	1 Laporan	1.000.000	1 Laporan	1.000.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian yang tepat waktu	100%	9.543.000	100%	47.000.000	100%	47.000.000	100%	47.000.000	100%	47.000.000	100%	47.000.000	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	18 Paket	-	18 Paket	7.000.000	18 Paket	7.000.000	18 Paket	7.000.000	18 Paket	7.000.000	18 Paket	7.000.000	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	23 Orang	9.543.000	23 Orang	20.000.000	23 Orang	20.000.000	23 Orang	20.000.000	23 Orang	20.000.000	23 Orang	20.000.000	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	23 Orang	-	23 Orang	20.000.000	23 Orang	20.000.000	23 Orang	20.000.000	23 Orang	20.000.000	23 Orang	20.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	231.620.000	100%	139.310.400	100%	107.000.000	100%	107.000.000	100%	107.000.000	100%	107.000.000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	5.000.000	3 Paket	4.000.000	3 Paket	4.000.000	3 Paket	4.000.000	3 Paket	4.000.000	3 Paket	4.000.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	163.160.000	12 Paket	67.310.400	12 Paket	35.000.000	12 Paket	35.000.000	12 Paket	35.000.000	12 Paket	35.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket
		BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										
		2024		2026		2027		2028		2029		2030		
		Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	8.000.000	12 Paket	7.000.000	12 Paket	7.000.000	12 Paket	7.000.000	12 Paket	7.000.000	12 Paket	7.000.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	4.000.000	12 Paket	3.000.000	12 Paket	3.000.000	12 Paket	3.000.000	12 Paket	3.000.000	12 Paket	3.000.000	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	2.000.000	5 Paket	2.000.000	5 Paket	2.000.000	5 Paket	2.000.000	5 Paket	2.000.000	5 Paket	2.000.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	4.460.000	12 Dokumen	4.000.000	12 Dokumen	4.000.000	12 Dokumen	4.000.000	12 Dokumen	4.000.000	12 Dokumen	4.000.000	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	-	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	2.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	45.000.000	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	49.000.000	12 Laporan	49.000.000	12 Laporan	49.000.000	12 Laporan	49.000.000	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			-	-	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	1.000.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	39.526.000	100%	24.833.500	100%	1.000.000	100%	1.000.000	100%	1.000.000	100%	1.000.000	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	-	0 Unit	0	1 Unit	250.000	1 Unit	250.000	1 Unit	250.000	1 Unit	250.000	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	39.526.000	1 Paket	24.833.500	1 Paket	500.000	1 Paket	500.000	1 Paket	500.000	1 Paket	500.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket
		BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										
		2024		2026		2027		2028		2029		2030		
		Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	-	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	-	0 Unit	0	1 Unit	250.000	1 Unit	250.000	1 Unit	250.000	1 Unit	250.000	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	-	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	332.780.000	100%	323.160.000	100%	296.460.000	100%	296.460.000	100%	296.460.000	100%	296.460.000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	2.000.000	4 Laporan	2.000.000	4 Laporan	2.000.000	4 Laporan	2.000.000	4 Laporan	2.000.000	4 Laporan	2.000.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	35.000.000	12 Laporan	16.000.000	12 Laporan	16.000.000	12 Laporan	16.000.000	12 Laporan	16.000.000	12 Laporan	16.000.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	295.780.000	12 Laporan	305.160.000	12 Laporan	278.460.000	12 Laporan	278.460.000	12 Laporan	278.460.000	12 Laporan	278.460.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	100%	364.064.200	100%	84.000.000	100%	89.000.000	100%	89.000.000	100%	89.000.000	100%	89.000.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	47.373.200	10 Unit	65.000.000	10 Unit	70.000.000	10 Unit	70.000.000	10 Unit	70.000.000	10 Unit	70.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket
		BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										
		2024		2026		2027		2028		2029		2030		
		Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	4.000.000	2 Unit	1.000.000	2 Unit	1.000.000	2 Unit	1.000.000	2 Unit	1.000.000	2 Unit	1.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	312.691.000	3 Unit	18.000.000	3 Unit	18.000.000	3 Unit	18.000.000	3 Unit	18.000.000	3 Unit	18.000.000	
JUMLAH 1			4.752.988.000		4.840.831.900		4.752.988.000		4.752.988.000		4.752.988.000		4.752.988.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelasanaan Pelimpahan Kewenangan Urusan Pemerintahan Umum dari Kepala Daerah Kepada Camat	100%	328.761.000,00	100%	352.949.946	100%	383.154.200	100%	499.987.000	100%	559.110.050	100%	784.188.170	S.3.1
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	-	100%	5.470.000	100%	5.470.000	100%	5.470.000	100%	5.470.000	100%	5.470.000	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	-	1 Dokumen	5.470.000	1 Dokumen	5.470.000	1 Dokumen	5.470.000	1 Dokumen	5.470.000	1 Dokumen	5.470.000	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Pelaksanaan Urusan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja lain	100%	11.700.000	100%	15.000.000	100%	20.735.000	100%	20.735.000	100%	20.735.000	100%	20.735.000	
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	-	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	10.735.000	1 Laporan	10.735.000	1 Laporan	10.735.000	1 Laporan	10.735.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket
		BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										
		2024		2026		2027		2028		2029		2030		
		Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	11.700.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100%	20.750.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 dokumen	20.750.000	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	25.000.000	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan	100%	296.311.000	100%	307.479.946	100%	331.949.200	100%	448.782.000	100%	507.905.050	100%	732.983.170	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3 Laporan	296.311.000	3 Laporan	307.479.946	3 Laporan	331.949.200	3 Laporan	448.782.000	3 Laporan	507.905.050	3 Laporan	732.983.170	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Penegakan Perda yang berkaitan dengan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	50.035.000	100%	27.235.000	100%	45.235.000	100%	45.235.000	100%	45.235.000	100%	45.235.000	S.3.1
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi dan Pembinaan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	47.800.000	100%	25.000.000	100%	43.000.000	100%	43.000.000	100%	43.000.000	100%	43.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket
		BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										
		2024		2026		2027		2028		2029		2030		
		Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	23.200.000	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	30.000.000	
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	24.600.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	13.000.000	1 Laporan	13.000.000	1 Laporan	13.000.000	1 Laporan	13.000.000	
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	2.235.000	100%	2.235.000	100%	2.235.000	100%	2.235.000	100%	2.235.000	100%	2.235.000	
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	2.235.000	1 Laporan	2.235.000	1 Laporan	2.235.000	1 Laporan	2.235.000	1 Laporan	2.235.000	1 Laporan	2.235.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	119.300.000	100%	118.000.000	100%	121.000.000	100%	121.000.000	100%	121.000.000	100%	121.000.000	S.3.1
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	119.300.000	100%	118.000.000	100%	121.000.000	100%	121.000.000	100%	121.000.000	100%	121.000.000	
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan	150 Orang	48.000.000	150 Orang	50.000.000	150 Orang	48.000.000	150 Orang	48.000.000	150 Orang	48.000.000	150 Orang	48.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket
		BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										
		2024		2026		2027		2028		2029		2030		
		Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Kebangsaan dan Ketahanan Nasional													
Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50 Orang	53.300.000	50 Orang	50.000.000	50 Orang	55.000.000	50 Orang	55.000.000	50 Orang	55.000.000	50 Orang	55.000.000	
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	18.000.000	4 Dokumen	18.000.000	4 Dokumen	18.000.000	4 Dokumen	18.000.000	4 Dokumen	18.000.000	4 Dokumen	18.000.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang dibina	100%	224.001.673	100%	239.735.000	100%	177.735.000	100%	177.735.000	100%	177.735.000	100%	177.735.000	S.3.1
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	-	138.295.000	100%	101.735.000	100%	49.735.000	100%	49.735.000	100%	49.735.000	100%	49.735.000	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	13829500000 %	4 Laporan	101.735.000	4 Laporan	49.735.000	4 Laporan	49.735.000	4 Laporan	49.735.000	4 Laporan	49.735.000	
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dilaksanakan oleh Kecamatan bagi Pemerintah Kota yang Tidak Memiliki Desa)	Persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi	100%	85.706.673	100%	88.000.000	100%	88.000.000	100%	88.000.000	100%	88.000.000	100%	88.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket
		BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										
		2024		2026		2027		2028		2029		2030		
		Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Lembaga Kemasyarakatan	47.020.673	2 Lembaga Kemasyarakatan	48.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	48.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	48.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	48.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	48.000.000	
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	28.686.000	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	30.000.000	
Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Fasilitasi dan Pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100%	-	100%	50.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000	
Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	50 Keluarga	-	50 Keluarga	5.000.000	50 Keluarga	5.000.000	50 Keluarga	5.000.000	50 Keluarga	5.000.000	50 Keluarga	5.000.000	
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	50 Keluarga	-	50 Keluarga	15.000.000	50 Keluarga	10.000.000	50 Keluarga	10.000.000	50 Keluarga	10.000.000	50 Keluarga	10.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket
		BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										
		2024		2026		2027		2028		2029		2030		
		Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	50 Keluarga	-	50 Keluarga	15.000.000	50 Keluarga	10.000.000	50 Keluarga	10.000.000	50 Keluarga	10.000.000	50 Keluarga	10.000.000	
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	50 Keluarga	-	50 Keluarga	5.000.000	50 Keluarga	5.000.000	50 Keluarga	5.000.000	50 Keluarga	5.000.000	50 Keluarga	5.000.000	
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	50 Keluarga	-	50 Keluarga	5.000.000	50 Keluarga	5.000.000	50 Keluarga	5.000.000	50 Keluarga	5.000.000	50 Keluarga	5.000.000	
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	50 Keluarga	-	50 Keluarga	5.000.000	50 Keluarga	5.000.000	50 Keluarga	5.000.000	50 Keluarga	5.000.000	50 Keluarga	5.000.000	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan *Monitoring* dan Evaluasi Pemerintahan Desa	100%	90.588.000	100%	90.248.000	100%	90.248.000	100%	90.248.000	100%	90.248.000	100%	90.248.000	S.3.1
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Dibina dan Diawasi	100%	90.588.000	100%	90.248.000	100%	90.248.000	100%	90.248.000	100%	90.248.000	100%	90.248.000	
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	10.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket
		BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										
		2024		2026		2027		2028		2029		2030		
		Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2 Dokumen	40.340.000	2 Dokumen	40.000.000	2 Dokumen	30.000.000	2 Dokumen	30.000.000	2 Dokumen	30.000.000	2 Dokumen	30.000.000	
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen	-	0 Dokumen	0	1 Dokumen	10.000.000	0 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	0 Dokumen	10.000.000	
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2 Dokumen	40.248.000	2 Dokumen	40.248.000	2 Dokumen	40.248.000	2 Dokumen	40.248.000	2 Dokumen	40.248.000	2 Dokumen	40.248.000	
JUMLAH 2					828.167.946		817.372.200		934.205.000		993.328.050		1.218.406.170	
TOTAL					5.668.999.846		5.570.360.200		5.687.193.000		5.746.316.050		5.971.394.170	

Sumber: Hasil Analisa Kecamatan Arjasari, 2025

Ket :

S.3.1 = Program yang mendukung sasaran KDH : Meningkatnya kualitas birokrasi yang lebih transparan, akuntabel, efektif, dan efisien

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Renstra Kecamatan Arjasari Tahun 2025-2029, akan diimplementasikan dalam bentuk pelaksanaan program dan kegiatan. Dalam rangka menunjang pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, maka pelaksanaannya perlu ditunjang oleh anggaran program operasional pada masing-masing program dan kegiatan. Berdasarkan hasil rekapitulasi anggaran pendanaan pada Tabel 4.2, dapat disimpulkan total belanja langsung Kecamatan Arjasari pada tahun ke-1 (2026) sebesar Rp.5.668.999.846; pada tahun ke-2 (2027) sebesar Rp.5.570.360.200; pada tahun ke-3 (2028) sebesar Rp.5.687.193.000; pada tahun ke-4 (2029) sebesar Rp.5.746.316.050; sementara pada tahun ke-5 (2030) sebesar Rp.5.971.394.170.

4.2 Uraian Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Tanpa ada dukungan dari kegiatan dan subkegiatan program prioritas pembangunan daerah tidak dapat berjalan dengan baik berikut ini daftar subkegiatan prioritas yang mendukung program prioritas pembangunan daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program Prioritas	Outcome	Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kapasitas kelembagaan kecamatan dalam mengelola urusan pemerintahan umum sebagai perpanjangan tangan Kepala Daerah	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya kapasitas dan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya efektivitas koordinasi kecamatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kerja kecamatan	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa melalui pembinaan, *monitoring,* dan evaluasi yang	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	

No.	Program Prioritas	Outcome	Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		berkesinambungan di wilayah kecamatan	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Arjasari, 2025

4.3 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui IKU PD

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualikatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi.

Indikator Kinerja Kecamatan Arjasari yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Arjasari dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Arjasari

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Laju Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	0.19 %	0.22 %	0.24 %	0.25 %	0.26 %	0.27%	Persentase dari selisih nilai IKM di kecamatan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, dibandingkan dengan nilai IKM tahun sebelumnya.

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Arjasari, 2025

4.4 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui IKK

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, pengukuran kinerja menjadi salah satu aspek yang sangat krusial. Pada tingkat Kecamatan terdapat tantangan signifikan tentang Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang terstruktur dan terstandarisasi. IKK ini menyebabkan terarahnya tujuan Kecamatan dalam melakukan evaluasi kinerja secara objektif, serta kemampuan untuk menilai sejauh mana program dan kegiatan kecamatan berdampak langsung terhadap masyarakat. Berikut ini tabel yang menjelaskan tentang Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Arjasari

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Laju Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	0.19 %	0.22 %	0.24 %	0.25 %	0.26 %	0.27%	Persentase dari selisih nilai IKM di kecamatan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, dibandingkan dengan nilai IKM tahun sebelumnya.

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Arjasari, 2025

4.5 Inovasi Kecamatan Arjasari

Sebagai salah satu Perangkat Daerah yang berperan langsung dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat wilayah, Kecamatan Arjasari dituntut untuk adaptif terhadap perkembangan teknologi serta mampu menjawab dinamika kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Oleh karena itu, Kecamatan Arjasari senantiasa berupaya menghadirkan berbagai terobosan inovatif yang tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan publik, tetapi juga memperkuat tata kelola pemerintahan dan mendorong pemberdayaan masyarakat. Memasuki periode perencanaan 2025–2029, Kecamatan Arjasari merancang sejumlah inovasi yang berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan tata kelola pemerintahan, serta pemberdayaan masyarakat. Inovasi ini merupakan wujud nyata komitmen Kecamatan Arjasari dalam mendukung pencapaian misi Pemerintah Kabupaten Bandung, khususnya misi ke-3 yaitu “Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan, dan

Akuntabel.” Selain itu, inovasi tersebut juga sejalan dengan tujuan strategis Kecamatan Arjasari yaitu “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik” yang menjadi orientasi utama dalam pembangunan jangka menengah lima tahun ke depan. Rancangan inovasi Kecamatan Arjasari yang disusun untuk periode perencanaan 2025–2029 adalah sebagai berikut:

1. SIPELIT UMKM (FASILITASI PEMBUATAN LEGALILTAS FORMAL PEMBENTUKAN UMKM), merupakan terobosan Kecamatan Arjasari dalam mengatasi kendala-kendala yang dialami oleh para pelaku UMKM di Kecamatan Arjasari dengan cara membentuk suatu perhimpunan UMKM se-Kecamatan Arjasari dalam sebuah legalitas formal yang nantinya perhimpunan tersebut menjadi wadah pembinaan, sosialisasi, pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), pendataan jenis-jenis produk, kerjasama dengan pihak-pihak lain yang berkaitan dengan pemasaran produk, serta pembinaan aplikasi pemasaran produk bagi para pelaku UMKM oleh Pemerintah Kecamatan Arjasari.

Dengan inovasi yang dirancang tersebut, Kecamatan Arjasari berkomitmen untuk menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Setiap inovasi tidak hanya ditujukan sebagai solusi atas permasalahan yang ada, tetapi juga sebagai langkah nyata dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan akuntabel. Ke depan, inovasi-inovasi ini diharapkan mampu menjadi budaya kerja aparatur, mempercepat transformasi pelayanan berbasis teknologi, serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Arjasari

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Rencana Strategis Kecamatan ini disusun sebagai dokumen awal perencanaan strategis yang menjadi dasar dalam perumusan arah kebijakan pembangunan kecamatan selama periode lima tahun ke depan. Dokumen ini mengacu pada RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 serta memperhatikan potensi, permasalahan, dan kebutuhan masyarakat di wilayah kecamatan.

Rencana Strategis ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan indikator kinerja utama yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan selanjutnya, termasuk Renja Kecamatan setiap tahunnya. Dengan adanya dokumen ini, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat kecamatan dapat berjalan lebih terarah, terukur, dan akuntabel. Penyusunan Renstra Kecamatan juga mengedepankan prinsip transparansi, partisipatif, akuntabel, dan berbasis data, sehingga diharapkan seluruh program dan kegiatan yang dirancang mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah secara menyeluruh.

Dengan adanya dokumen ini, Kecamatan diharapkan dapat menjadi simpul koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan pembangunan kewilayahan dan menjembatani kebutuhan masyarakat dengan arah kebijakan pemerintah daerah. Selanjutnya, Rencana Strategis ini akan menjadi bahan pembahasan dalam forum diskusi maupun konsultasi guna memperoleh masukan untuk menyempurnakan dokumen Renstra Kecamatan Arjasari Tahun 2025 -2029.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Renstra Kecamatan Arjasari Tahun 2025 - 2029 merupakan pedoman dan acuan bagi seluruh unit kerja yang ada di lingkungan Kecamatan Arjasari dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi, sehingga dengan adanya Renstra ini diharapkan dalam pelaksanaanya, tujuan organisasi dapat tercapai secara sinergis dan berkesinambungan, terutama dalam mendukung tercapainya sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025 - 2029. Sehingga untuk mencapai tujuan tersebut, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Dalam Renstra Kecamatan Arjasari 2025 - 2029 telah ditetapkan rumusan pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025 - 2029.
2. Renstra Kecamatan Arjasari Tahun 2025 - 2029 harus dijadikan pedoman dalam penyiapan Renja Kecamatan Arjasari untuk setiap tahunnya dengan tetap mengacu pada RKPD Kabupaten Bandung.
3. Dalam mendukung penyiapan APBD Kabupaten Bandung, keberadaan Rentra Kecamatan Arjasari harus dijadikan pedoman penyiapan RKA dan DPA Kecamatan Arjasari.
4. Apabila ada kebijaksanaan panganggaran untuk Kecamatan Arjasari di luar dari Renstra ini maka akan dilakukan perubahan / perbaikan.
5. Hasil pelaksanaan tahunan Renstra Tahun 2025 - 2029 yang tercermin dari Renja Kecamatan Arjasari, harus dipertanggungjawabkan secara sistematis dan melembaga sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku.

5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan

Pengendalian dan evaluasi merupakan bagian penting dalam siklus manajemen pembangunan yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan secara efektif dan efisien.

Di tingkat kecamatan, pelaksanaan pengendalian pembangunan dilakukan melalui mekanisme pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan berdasarkan indikator kinerja dan capaian *output*. Camat sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan bertanggung jawab untuk memastikan setiap program dan kegiatan Perangkat Daerah yang dilaksanakan di wilayahnya berjalan sesuai dengan target dan rencana kerja yang telah disepakati.

Evaluasi pembangunan dilakukan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen perencanaan, serta untuk mengidentifikasi hambatan dan kendala dalam pelaksanaannya, evaluasi ini mencakup evaluasi internal oleh kecamatan dan masukan dari pemangku kepentingan, serta menjadi bahan dalam penyusunan laporan kinerja tahunan (LKIP). Melalui pengendalian dan evaluasi

yang sistematis dan berkelanjutan, kecamatan dapat mengambil langkah korektif dan perbaikan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang tidak berjalan sesuai rencana, serta meningkatkan kualitas perencanaan di tahun-tahun berikutnya, hal ini penting untuk menjamin akuntabilitas kinerja dan efektivitas pembangunan wilayah yang berorientasi pada hasil (*outcome*) dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan aparatur Kecamatan Arjasari dalam rangka melaksakan tugas, fungsi dan kewenangannya untuk menjalankan kebijakan, program, dan kegiatan dituntut memiliki karakter dan sifat tangguh adaptif, inovatif, dan kreatif. Menjadi sebuah komitmen bahwa dokumen ini harus menjadi pijakan yang kuat dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara menyeluruh

Soreang, September 2025

CAMAT ARJASARI

Ttd

ASEP HADIAN

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Susunan Organisasi Kecamatan Arjasari 20

Gambar 2.2 Wilayah Kecamatan Arjasari 28

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1	Kondisi Kepegawaian berdasarkan Jenis Kelamin	25
Tabel 2.2	Kondisi Kepegawaian berdasarkan pangkat dan golongan	25
Tabel 2.3	Kondisi Kepegawaian berdasarkan Tingkat Pendidikan	26
Tabel 2.4	PNS berdasarkan Eselon Jabatan	26
Tabel 2.5	Berita Acara rekonsiliasi Aset Tahun 2024	27
Tabel 2.6	Luas Wilayah Desa di Kecamatan Arjasari	30
Tabel 2.7	Rekapitulasi Jumlah Penduduk di Kecamatan	30
Tabel 2.8	Rekapitulasi Pendidikan di Kecamatan	31
Tabel 2.9	Jenis Kewenangan yang Dilimpahkan Kepada Kecamatan	35
Tabel 2.10	Target, Realisasi dan Capaian Tujuan dan Sasaran	38
Tabel 2.11	Pencapaian Indikator IKM Kecamatan Arjasari	40
Tabel 2.12	Pencapaian Indikator Jumlah Desa Cepat Berkembang	41
Tabel 2.13	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Arjasari	42
Tabel 2.14	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan	50
Tabel 2.15	Tantangan Pembangunan Tata Kelola Pemerintah	63
Tabel 2.16	Isu Strategis KLHS RPJMD Kabupaten Bandung	65
Tabel 2.17	Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran	68
Tabel 2.18	Perumusan Isu Strategis Kecamatan Arjasari	70
Tabel 3.1	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Arjasari	74
Tabel 3.2	Penahapan Renstra Kecamatan Arjasari	75
Tabel 3.3	Teknik merumuskan arah kebijakan Renstra	78
Tabel 4.1	Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Renstra..	80
Tabel 4.2	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan	89
Tabel 4.3	Daftar SubKegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	101
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama Kecamatan Arjasari	102
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci	103